

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

**NINA NUR'AINI WIDAD
NIM. G02218018**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Nur'aini Widad
NIM : G02218018
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan *Value for Money* (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 23 April 2022

Yang menyatakan,



(Nina Nur'aini Widad)

NIM. G02218018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nina Nur'aini Widad dengan NIM. G02218018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 April 2022

Pembimbing,



Nufaisa, S.Sos.I, M.Ak
NIP. 198907312019032014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nina Nuraini Widad NIM. G02218018 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Nufaisa, S. Sos.I, M. Ak
NIP. 198907312019032014

Penguji II,

Hastanti Agustin Rahayu, SE., M.Acc., Ak., CA. BKP
NIP.198308082018012001

Penguji III,

Dr. Imam Buchori, SE., M. Si
NIP. 196809262000031001

Penguji IV,

Mohammad Niyaul Muflih, S.E.I., M.E
NIP. 202202001

Surabaya, 12 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Siraini Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.
NIP.197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nina Nuraini Widad
NIM : G02218018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : ninanurainiwidad22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan *Value for Money*

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)

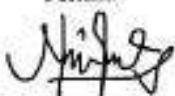
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Penulis


(Nina Nuraini Widad)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)” merupakan hasil penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan pendekatan *Value for Money* pada tahun 2017-2020.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan memakai tiga metode diantaranya: observasi yaitu pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah kemudian dilakukan analisis, lalu disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pendekatan *Value for Money* selama tahun 2017-2020 yaitu untuk perhitungan rasio ekonomi memiliki rata-rata senilai 94,35% dan dinyatakan ekonomis. Lalu dalam perhitungan rasio efisiensi memiliki rata-rata senilai 89,82% hal tersebut dapat dikategorikan efisien. Kemudian perhitungan rasio efektif memiliki rata-rata senilai 96,36% dinyatakan belum efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih dikatakan belum efektif tetapi hasil dari perhitungannya mendekati 100%.

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu perlu ditingkatkannya efektivitas kinerja keuangan. Dengan cara berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik, sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

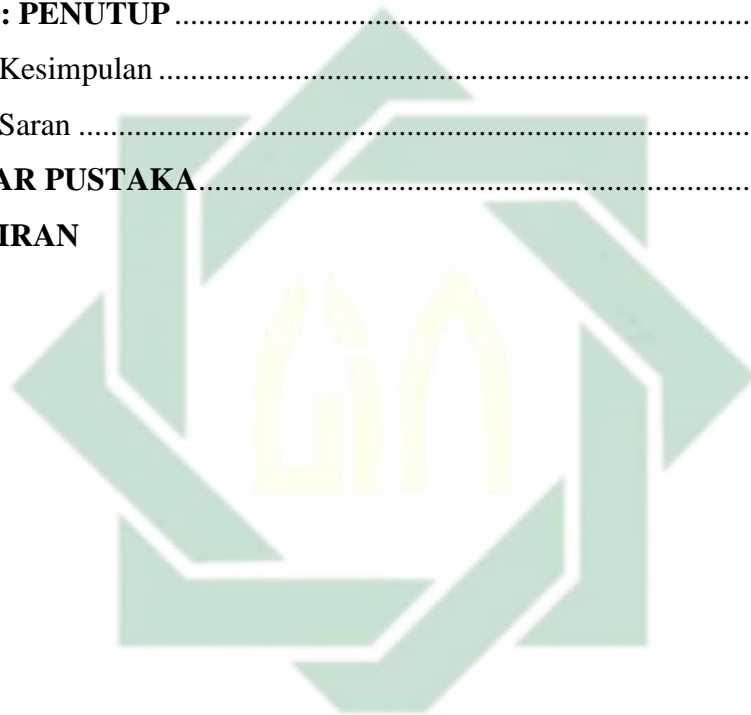
Kata Kunci: Pengukuran, Kinerja Keuangan, *Value for Money*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.2. Akuntansi Keuangan Daerah.....	12
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
2.1.4. Pengukuran Kinerja.....	21
2.1.5. <i>Value for Money</i>	28
2.2. Penelitian Terdahulu	33
BAB III: METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian	38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39

3.6 Uji Keabsahan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2 Hasil	51
4.3 Pembahasan.....	67
BAB V: PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Lap. Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 ..	4
Tabel 2.1	Kriteria Ekonomis	31
Tabel 2.2	Kriteria Efisien	32
Tabel 2.3	Kriteria Efektivitas	32
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Data Narasumber dalam Penelitian	40
Tabel 4.1	Laporan Realisasi APBD tahun 2017	51
Tabel 4.2	Laporan Realisasi APBD tahun 2018	52
Tabel 4.3	Laporan Realisasi APBD tahun 2019	52
Tabel 4.4	Laporan Realisasi APBD tahun 2020	53
Tabel 4.5	Kriteria Ekonomi	68
Tabel 4.6	Perhitungan Rasio Ekonomi	68
Tabel 4.7	Kriteria Efisien	71
Tabel 4.8	Perhitungan Rasio Efisien	71
Tabel 4.9	Kriteria Efektiftivitas	73
Tabel 4.10	Perhitungan Rasio Efektivitas	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pengukura Kinerja.....	26
Gambar 2.2 Skema <i>Value for Money</i>	29
Gambar 4.1 Logo Kabupaten Lamongan.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan.....	50
Gambar 4.3 Grafik Rasio Ekonomi.....	69
Gambar 4.4 Grafik Rasio Efisiensi.....	72
Gambar 4.5 Grafik Rasio Efektivitas.....	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintahan adalah bagian dari lembaga sektor publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Lembaga pemerintahan lebih terkesan sebagai suatu organisasi politik daripada organisasi ekonomi apabila dibanding dengan organisasi *non-profit* lainnya (Khalikussabir, 2017). Pemerintah pusat menyerahkan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah agar dapat membangun serta mengelola daerah masing-masing dengan baik. Hal tersebut sering dinamakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, merupakan kewajiban, hak, serta wewenang daerah otonom untuk mengurus serta mengatur sendiri kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Setiap daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan daerah seperti halnya pemilihan pemimpin daerah, retribusi daerah dan pemungutan pajak, pengelolaan kekayaan daerah, serta memperoleh bagi hasil berasal dari pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya lain yang ada di daerah. Disamping itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-Undang No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memerintahkan pemerintah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih), Laporan Operasional (LO), serta Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan keuangan disusun supaya memberikan informasi yang signifikan tentang situasi keuangan serta semua transaksi yang dilaksanakan oleh lembaga pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah sangat mempengaruhi akan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Sakti, 2021). Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai organisasi sektor publik yang tugas dan fungsinya dalam menjalankan birokrasi pemerintah sehingga peranannya tidak dapat digantikan oleh pihak swasta. Saat ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dihadapkan oleh berbagai tuntutan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus baik serta maksimal karena setiap masyarakat ingin mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki standar yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja. Oleh karena itu pengukuran kinerja pemerintah sangat dibutuhkan.

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian keberhasilan pelayanan publik di masa mendatang. Penilaian akuntabilitas kinerja keuangan suatu organisasi pemerintah dapat menggunakan

analisis pencapaian target serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dapat dinilai dengan *Value for Money* yang memiliki tiga konsep dalam mengembangkan indikator kinerja yang dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas (Mardiasmo, 2018).

Untuk dapat mengetahui tingkat ekonomi, efektif, serta efisien, suatu lembaga pemerintah maka wajib untuk mengenali tingkat *input*, *output*, serta *outcome*. *Input* yaitu sumber daya yang akan dipakai untuk implementasi suatu program, aktivitas serta kebijakan. *Output* yaitu hasil yang telah didapatkan dari suatu aktivitas, program, dan kebijakan. Dengan melakukan perbandingan keluaran bisa dianalisis apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana (Mardiasmo, 2018). *Outcome* yaitu akibat yang timbul dari suatu kegiatan tertentu. Dengan maksud lain *Outcome* yaitu hasil yang dicapai suatu kegiatan atau program diperbandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD mendukung dalam upaya efektivitas dan kapabilitas pemerintah daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Berikut ini merupakan tabel laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2017	Pendapatan Daerah	2.779.816.159.236,60	2.716.042.671.044,82	97,71%
	Belanja	2.841.628.514.716,89	2.729.589.182.635,60	96,06%
	Pembiayaan	61.812.355.480,29	63.842.975.480,29	103,29%
2018	Pendapatan Daerah	2.904.634.147.135,00	2.811.062.543.333,02	96,79%
	Belanja	2.950.680.611.024,51	2.813.870.872.928,02	95,35%
	Pembiayaan	46.046.463.889,51	46.144.463.889,51	100,21%
2019	Pendapatan Daerah	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	95,55%
	Belanja	3.038.634.831.480,51	2.875.512.218.177,60	94,63%
	Pembiayaan	40.836.134.294,51	41.187.753.267,51	100,86%
2020	Pendapatan Daerah	2.974.914.693.684,05	2.838.272.211.782,49	95,41%
	Belanja	3.011.486.940.190,82	2.823.137.926.114,77	93,75%
	Pembiayaan	36.572.246.506,77	36.290.160.938,77	99,23%

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan)

Dari tabel realisasi anggaran tersebut menunjukkan jika laporan realisasi anggaran Kabupaten Lamongan adalah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jika dilihat dari tahun 2017-2020 pendapatan daerah Kabupaten Lamongan mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahunnya meskipun secara tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi global yaitu Covid-19 sehingga perekonomian menjadi terganggu.

Pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) atas sumber yang dipercaya. Sehingga pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya apakah berhasil atau tidak. Akuntabilitas sektor publik juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Governance*.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Muhammad Ubaidillah (2019), hasil dari penelitian menyatakan dari segi rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di tahun 2014-2017 berada pada kriteria ekonomis yakni sebesar 93,26%. Dari segi rasio efisien pada tahun 2014-2017, memiliki rata-rata rasio efisien mencapai 99,76% dapat disimpulkan sangat efisien. Serta dari segi rasio efektivitas pada tahun 2014-2017 kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dinyatakan tidak efektif, karena hanya mencapai 97,99%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kriteria efektivitas itu sendiri yang harus lebih dari 100% baru dikatakan efektif.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah tahapan evaluasi tentang taraf peningkatan atas pencapaian pelaksanaan suatu program Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah kabupaten Lamongan dalam jangka waktu tertentu. Dari uraian diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan perbedaan pada tahun penelitian yakni 2017-2020. Sehingga peneliti mengangkat judul “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu: “Bagaimana pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan *Value for Money* (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan analisis *Value for Money* pada tahun 2017-2020”.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada manfaat teoretis serta manfaat praktis. Dibawah ini merupakan uraian manfaat teoretis serta praktis dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Manfaat teoretis

- a. Untuk wawasan mengenai kinerja keuangan suatu organisasi, anggaran yang akan digunakan dalam kurun waktu tertentu, serta realisasi anggaran yang sudah digunakan Pemerintah Daerah melalui Badan Pengeloalan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

- b. Memberi pengetahuan pada masyarakat secara umum mengenai kinerja keuangan suatu organisasi *non-profit* khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- c. Menunjukkan bahwa setiap organisasi pemerintahan bertanggungjawab atas semua anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis: melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis bisa memperluas wawasan secara langsung mengenai kinerja keuangan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- b. Bagi Pemerintah: dengan melakukan penelitian ini, penulis secara umum menyampaikan informasi secara rinci tentang rencana kerja yang disusun pemerintah setiap tahunnya untuk menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- c. Bagi masyarakat: hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara luas mengenai kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Lamongan. Serta untuk memahami realisasi pada anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- d. Bagi Universitas: dapat memberi tambahan karya ilmiah serta referensi untuk mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik banyak di artikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yakni analisis serta teknik akuntansi yang dipakai dalam sektor publik. Menurut (Abdul Halim, 2013) Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntansi Sektor Publik yakni alat informasi yang baik untuk pemerintah untuk manajemen atau alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut (Biduri, 2018) Akuntansi Sektor Publik ialah aktivitas jasa yang kegiatannya memiliki hubungan dengan usaha, paling utama yang bersifat keuangan untuk mengambil keputusan dalam menyediakan kebutuhan serta hak publik melewati layanan publik yang dilaksanakan oleh organisasi perusahaan. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa Akuntansi Sektor Publik memiliki tugas yaitu pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, serta pembuat laporan keuangan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Entitas sektor publik paling banyak untuk dikenali yaitu entitas pemerintahan. Entitas pemerintahan sebagaimana entitas secara umum, yang nantinya akan berkegiatan berdasarkan anggaran. Oleh karena itu sangat perlu dimengerti mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila memahami Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Sekarang ini Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dalam kemajuan yang cukup berarti, salah satunya dilihat dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan Akuntansi Sektor Publik khususnya di pemerintahan.

2.1.1.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Dibawah ini adalah tujuan dari Akuntansi Sektor Publik yang sudah diuraikan oleh *American Accounting Association* (1970) dalam buku (Majid, 2019):

- 1) *Accountability*, tujuannya yaitu untuk memberi informasi yang bisa bermanfaat bagi manajer sektor publik serta bisa dipakai dalam laporan pertanggungjawaban divisi, bidang, maupun sumber daya yang ada di bawahnya. Selain itu, arti dari tujuan ini yaitu untuk pelaporan aktivitas kepada publik mengenai kegiatan pemerintahan serta penggunaan anggaran sektor publik.
- 2) *Management Control*, tujuannya yaitu untuk memberi informasi yang benar-benar diperlukan dalam pengelolaan suatu entitas atau lembaga secara cepet, tepat, ekonomis dan efisien atas operasi

dan pemakaian dari sumber daya yang telah dianggarkan entitas atau lembaga.

Akuntansi Sektor Publik berhubungan dengan tiga pokok utama, yakni untuk menyediakan informasi, mengendalikan manajemen serta akuntabilitas. Informasi akuntansi dipakai sebagai penentu biaya yang akan digunakan dalam suatu kegiatan dan kelayakannya dalam hal teknis atau ekonomis. Informasi akuntansi juga dimanfaatkan sebagai pertimbangan saat mengambil keputusan, dimana hal tersebut dapat membantu kerja dari manajer dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Selain itu, informasi tersebut juga dapat dipakai dalam pemilihan program-program mana saja yang efektif, tepat, ekonomis untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi juga sangat diperlukan dalam penilaian kinerja sektor publik.

2.1.1.3. Jenis dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Secara umum, jenis entitas sektor publik bisa dibagi menjadi tiga yaitu (Biduri, 2018):

1) Instansi Pemerintah yaitu bagian entitas sektor publik yang yang dalam bentuk instansi pemerintah antara lain:

- a) Pemerintah Pusat, yang di dalamnya terdapat kementerian seperti Departemen Agama, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan lain-lain

- b) Pemerintah Daerah, yang di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan lain-lain.
- 2) Organisasi Nirlaba Milik Swasta adalah bagian entitas sektor publik yang dipunyai serta dikelola oleh swasta. Contohnya seperti sekolah dan universitas swasta, yayasan seperti *Djarum Foundation*, dan lain-lain.
- 3) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah adalah bagian entitas sektor publik yang bentuknya bukan lembaga pemerintah, tapi milik pemerintah. Contohnya seperti Rumah sakit milik pemerintah, dan lain-lain

Dalam beberapa kondisi, akuntansi sektor publik dengan sektor swasta memiliki perbedaan. Perbedaan karakter serta sifat akuntansi tersebut terjadi karena perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Komponen lingkungan yang berpengaruh dengan entitas sektor publik meliputi:

- 1) Faktor Politik seperti hubungan negara dengan masyarakat, massa, elit politik dan lainnya.
- 2) Faktor Ekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan lainnya.
- 3) Faktor Demografi seperti pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, migrasi dan lainnya.

- 4) Faktor Kultur seperti keragaman suku, agama, ras, budaya, sosiologi masyarakat dan lainnya.

2.1.2. Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1. Definisi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari divisi pada akuntansi sektor publik yang memiliki banyak perhatian dari beberapa pihak sejak reformasi (Renyowijoyo, 2013). Akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan pada lembaga pemerintah daerah digunakan agar memperoleh keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak luar (Sholihin, 2017) . Dari Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 terlihat bahwa dalam keuangan daerah memiliki dua unsur penting yakni:

- a. Semua hak yang dimaksud sebagai hak guna melakukan pemungutan retribusi daerah, pajak daerah, dan atau penerimaan sumber-sumber lain berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga menambah kekayaan daerah.

- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan daerah dan lain sebagainya yang bersangkutan.

2.1.2.2. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

1) Kepatuhan dan Pengelolaan

Berfungsi untuk memberi kepastian kepada penerima laporan keuangan tahunan resmi bahwa pengelolaan dana sudah dilaksanakan dengan undang-undang serta peraturan lainnya yang ditentukan (Mardiasmo, 2018).

2) Perencanaan serta Informasi Otorisasi

Berfungsi sebagai pedoman dalam merancang kebijakan serta aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan dipakai sebagai penyampaian informasi pendukung atas kewenangan pemakai keuangan.

3) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Berfungsi sebagai gambaran akuntabilitas publik. Laporan keuangan digunakan dalam mengawasi kinerja serta menilai manajemen, pedoman guna melihat tren dari masa ke masa, keberhasilan tujuan yang ditetapkan, serta melakukan perbandingan dengan kinerja organisasi serupa, apabila ada.

4) Hubungan Masyarakat

Berfungsi memberikan kesempatan organisasi untuk mengeluarkan deklarasi kinerja kepada pengguna yang

terdampak, karyawan serta publik. Selain itu, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan publik dan pemangku kepentingan lainnya.

5) Keberlangsungan Organisasi

Berguna untuk memberi bantuan para pembaca untuk memutuskan apakah suatu unit kerja atau organisasi dapat lanjut mencadangkan barang dan pelayanan (jasa) di masa depan.

6) Sumber Fakta dan Gambaran

Berfungsi memberi informasi kepada beberapa pihak penting yang ingin mengetahui organisasi secara mendalam (Mardiasmo, 2018).

2.1.2.3. Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Terdapat beberapa pihak penting yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat
- 2) Masyarakat
- 3) Para Wakil Rakyat (DPRD)
- 4) Analis dan Peneliti
- 5) Badan Pemeriksa
- 6) Pemerintah Daerah Lainnya
- 7) Pihak yang memiliki atau memberi peran dalam proses investasi, donasi, dan pinjaman (Sholihin, 2017).

2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.3.1. Pengertian Anggaran

Anggaran yaitu rencana hasil yang akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditunjukkan dengan ukuran keuangan, sedangkan penganggaran yaitu metode atau proses penyusunan anggaran (Mardiasmo, 2018). Dalam hal penganggaran di sektor swasta, anggaran adalah hal yang tertutup untuk publik serta rahasia perusahaan, akan tetapi pada sektor publik menjadi sebaliknya dimana anggaran harus diberitahukan kepada publik untuk diberi kritikan, dikaji bersama serta diberi saran. Anggaran yaitu dasar tindakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk pendapatan, pengeluaran, transfer dan rencana keuangan, dalam mata uang rupiah dan disusun secara sistematis menurut klasifikasi tertentu untuk suatu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui dan dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD, serta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang daerah (Nasution, 2019). Menurut (Abdul Halim, 2013) APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target

minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. APBD merupakan bagian terpenting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan peningkatan dan pelayanan kemaslahatan masyarakat umum untuk mencapai tujuan negara. masyarakat umum untuk mencapai tujuan negara.

2.1.3.2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki beberapa fungsi, antara lain (Nasution, 2019):

1) Fungsi Perencanaan

Bahwa anggaran dijadikan dasar untuk manajemen dalam perencanaan program untuk tahun tertentu.

2) Fungsi Otorisasi

Bahwa anggaran dijadikan pedoman untuk merealisasikan pendapatan serta pengeluaran untuk tahun tersebut.

3) Fungsi Alokasi

Berarti anggaran harus bertujuan guna mengurangi pengeluaran berlebihan pada sumber daya dan pengangguran serta untuk menaikkan efektivitas dan efisiensi ekonomi.

4) Fungsi Pengawasan

Bahwa anggaran dijadikan pemabantu orientasi untuk mengetahui apakah program pelaksanaan pemerintahan negara telah sama dengan keputusan yang sudah ditentukan.

5) Fungsi Stabilisasi

Bahwa anggaran dijadikan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan serta menjaga fondasi ekonomi.

6) Fungsi Distribusi

Bahwa kebijakan anggaran harus didasarkan rasa kepatutan serta keadilan (Nasution, 2019).

2.1.3.3. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran

Berikut ini merupakan beberapa prinsip dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Prawoto, 2011):

- 1) Keterbukaan
- 2) Kecermatan
- 3) Komprehensif
- 4) Dinamis
- 5) Terinci
- 6) Fleksibilitas
- 7) Periodisitas
- 8) *Prelabel*
- 9) Pembebanan pada anggaran pengeluaran serta menguntungkan pada anggaran penerimaan.
- 10) Kelengkapan atau Universalitas
- 11) Anggaran Berimbang

2.1.3.4. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 285 terdiri atas:

- a) Pajak daerah,
- b) Retribusi daerah,
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:
 - (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah
 - (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
- d) Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi:
 - (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - (2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - (3) Jasa giro
 - (4) Pendapatan bunga
 - (5) Pendapatan denda pajak dan retribusi
 - (6) Pendapatan lain-lain yang merupakan pendapatan sah daerah

2) Dana Perimbangan. Sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 288 Dana Perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH), bersumber dari:

- (1) Pajak
- (2) Cukai,
- (3) Sumber Daya Alam

b) Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

c) Dana Alokasi Khusus (DAK), bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3) Pendapatan Lain-Lain yang sah, terdiri atas:

- a) Pendapatan Hibah
- b) Pendapatan Dana Darurat
- c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
Lainnya
- e) Dana Penyesuaian
- f) Dana Otonomi Khusus

2.1.3.5. Belanja Daerah

Belanja daerah yaitu semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah selama satu tahun anggaran yang tidak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah mencakup belanja langsung serta tidak langsung.

1) Belanja Langsung

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung terdiri atas:

- a) Belanja Pegawai
- b) Bunga
- c) Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil
- g) Bantuan Keuangan dan
- h) Belanja Tak Terduga

2.1.3.6. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang penting untuk dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan didapat kembali, baik di tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun anggaran

selanjutnya. Pembiayaan daerah yaitu transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk menggunakan surplus APBD. Pembiayaan Daerah terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Penerimaan pinjaman daerah
- d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f) Penerimaan piutang daerah

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
- d) Pemberian pinjaman daerah.

2.1.4. Pengukuran Kinerja

2.1.4.1. Definisi Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan skema umum keberhasilan implementasi suatu program dalam mencapai tujuan, target, visi dan misi organisasi yang tercantum dalam rencana strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) yaitu suatu metode menilai kesuksesan pekerjaan pada sasaran serta tujuan yang telah diberikan sebelumnya (Moh Mahsun, 2011).

Pengukuran kinerja juga dapat diartikan sebagai alat atau metode yang digunakan untuk merekam dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan terhadap strategi, tujuan, serta sasaran sehingga perkembangan suatu organisasi dapat diketahui dan meningkatkan kualitas akuntabilitas serta pengambilan keputusan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan memberi bantuan manajer publik untuk menilai keberhasilan strategi organisasi dengan metode pengukuran keuangan serta non-keuangan.

Pengukuran kinerja sektor publik digunakan supaya mendapatkan tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik bertujuan sebagai alat bantu peningkatan kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja bermaksud memberi bantuan pemerintah agar fokus terhadap sasaran dan tujuan kegiatan. Hal tersebut yang nantinya dapat menaikkan tingkat efektivitas dan efisiensi entitas sektor publik dalam pemberian layanan pada masyarakat. Kedua, kinerja sektor publik dipakai untuk pengambilan keputusan serta pengalokasian sumber daya. Ketiga, kinerja sektor publik memiliki tujuan mewujudkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

2.1.4.2. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Sektor publik tidak dapat dipisahkan dari keperluan publik, oleh karena itu pengukuran kinerja dibutuhkan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan misi sektor publik dapat dipenuhi oleh penyedia barang dan layanan publik. Secara internal organisasi, pengukuran kinerja juga berguna dalam menunjang kegiatan manajemen organisasi. Berikut merupakan kegunaan pengukuran kinerja baik bagi internal maupun eksternal entitas sektor publik (Moh Mahsun, 2011):

- 1) Memberi kepastian rencana kerja dapat tercapai sesuai kesepakatan.
- 2) Melihat serta menilai kinerja lalu membandingkan dengan program kerja kemudian melakukan perbaikan terhadap kinerja.
- 3) Memberi pemahaman yang kuat pada para pelaksana tentang ukuran yang dipakai dalam kesuksesan kinerja.
- 4) Menentukan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
- 5) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- 6) Memberi hukuman dan penghargaan secara objektif atas prestasi pelaksana yang sudah dinilai tepat menggunakan sistem pengukuran kinerja yang telah ditentukan.
- 7) Memberi pemahaman tahapan program organisasi pemerintah.
- 8) Memberi kepastian bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan dengan objektif.
- 9) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
- 10) Sebagai alat komunikasi antarbawahan serta pimpinan dalam usaha perbaikan kinerja organisasi.

2.1.4.3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Elemen pokok dari pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut (Moh Mahsun, 2011):

1) Menentukan strategi, sasaran serta tujuan organisasi

Strategi merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh organisasi untuk menyelesaikan sasaran serta tujuan. Sasaran adalah tujuan dari organisasi yang telah dikemukakan secara akurat disertai tenggat waktu secara jelas. Tujuan merupakan pernyataan secara global (belum eksplisit) mengenai apa yang diinginkan organisasi untuk dicapai. Strategi, sasaran, serta tujuan tersebut ditentukan yang mengacu pada visi dan misi suatu organisasi. Kemudian dapat ditetapkan ukuran serta indikator kinerja dengan benar.

2) Merumuskan ukuran serta indikator kinerja

Tinjauan kinerja secara langsung merujuk pada ukuran kinerja. Sedangkan pada evaluasi kinerja tidak langsung merujuk pada indikator kinerja, seperti hal-hal yang hanya indikasi kinerja. Ukuran kinerja serta indikator kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi, sasaran serta tujuan. Indikator kinerja dapat berupa faktor-faktor utama keberhasilan serta indikator kinerja kunci (Moh Mahsun, 2011). Faktor utama keberhasilan merupakan suatu sektor yang menunjukkan keberhasilan kinerja organisasi. Sektor ini memberi gambaran

prasangka manajerial dengan mempertimbangkan variabel keuangan dan non-keuangan utama. Sedangkan indikator kinerja kunci adalah sekumpulan indikator yang bisa dipandang sebagai ukuran kinerja utama, baik keuangan ataupun non-keuangan guna menjalankan kegiatan serta kinerja unit bisnis. Indikator kinerja juga berperan penting bagi pemerintah adapun sebagai berikut (Mardiasmo, 2018):

- a) Memberi bantuan penjelasan mengenai tujuan dari organisasi
 - b) Menunjukkan standar kinerja
 - c) Saran untuk menetapkan skema insentif manajerial
 - d) Menilai target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
 - e) Menguatkan pengguna jasa pelayanan pemerintah untuk melaksanakan pilihan
 - f) Menentukan standar kinerja
 - g) Menentukan operasi yang mempunyai biaya yang lebih efektif untuk mencapai target,
 - h) Menunjukkan efektivitas, dan
 - i) Menunjukkan proses, daerah, atau bagian yang berpotensi untuk dilaksanakan penghematan.
- 3) Mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi

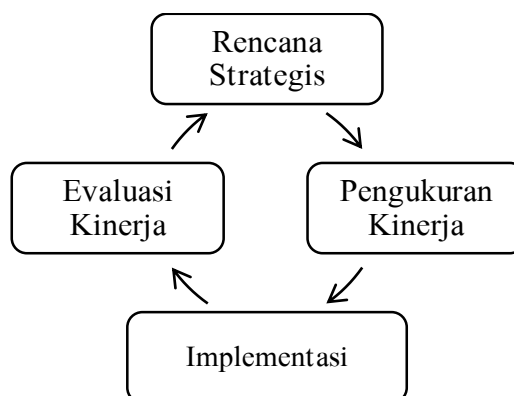
Ketika telah memiliki ukuran serta indikator kinerja yang jelas, maka dimungkinkan untuk menetapkan ukuran kinerja. Menilai tingkat keberhasilan strategi, sasaran dan tujuan adalah

melakukan perbandingan hasil yang sebenarnya dengan ukuran dan indikator kinerja yang telah ditentukan. Analisis antara hasil sebenarnya dengan ukuran serta indikator kinerja ini memperoleh hasil penyimpangan nol, penyimpangan positif, ataupun penyimpangan negatif (Moh Mahsun, 2011).

4) Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja akan memberi deskripsi pada penerima tentang ukuran kinerja yang diperoleh suatu entitas. Hasil kinerja entitas tersebut bisa diukur menggunakan pedoman pengukuran yang telah ditentukan. Informasi hasil kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas serta pengambilan keputusan (Moh Mahsun, 2011). Faktor yang penting dalam penerapan manajemen strategi salah satunya yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan tahapan dari siklus manajemen strategis, seperti terlihat pada gambar dibawah ini (Moh Mahsun, 2011):

Gambar 2.1
Skema Pengukuran Kinerja



(Sumber: Buku Moh. Mahsun "Akuntansi Sektor Publik" 2011)

2.1.4.4. Informasi yang dipakai sebagai Pengukuran Kinerja

1) Informasi Keuangan

Evaluasi laporan kinerja keuangan dinilai dengan berpedoman pada anggaran yang telah dicapai, evaluasi dilaksanakan dengan menelaah varian (perbedaan atau selisih) antara kinerja sebenarnya dengan kinerja yang diperkirakan. Telaah varians secara umum berfokus pada:

- a) Varians pendapatan
- b) Varians pengeluaran
 - Varians belanja rutin
 - Varians belanja modal/investasi

Sesudah menganalisis varians, sehingga selanjutnya mengidentifikasi sumber dari penyebab terjadinya varians dengan mencari varians pada tingkat manajemen terendah. Hal tersebut yang digunakan untuk melihat unit kerja mana yang bertanggungjawab atas timbulnya varians pada manajemen terendah (Mardiasmo, 2018).

2) Informasi Non-keuangan

Informasi non-keuangan bisa meningkatkan kepercayaan pada kualitas tahapan kontrol manajemen. Macam informasi non-keuangan bisa ditunjukkan dengan bentuk variabel kunci (*key variable*). Variabel kunci yaitu variabel yang menunjukkan faktor keberhasilan organisasi. Apabila terdapat perubahan yang tak

diinginkan, maka variabel tersebut harus disesuaikan secara cepat (Mardiasmo, 2018).

2.1.5. *Value for Money*

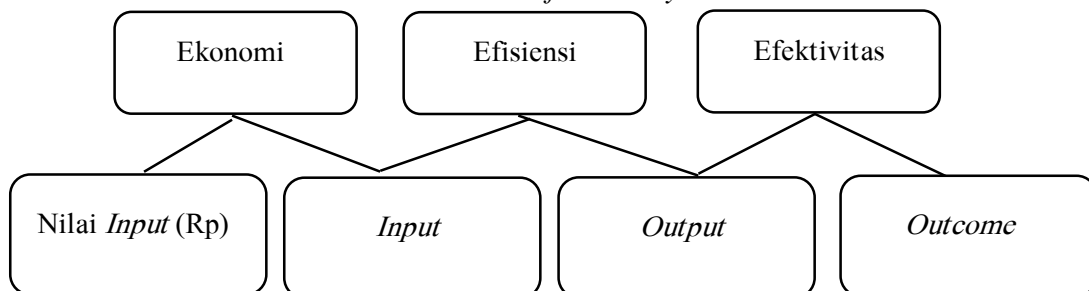
2.1.5.1. Pengertian dan Indikator *Value for Money*

Value for Money yaitu cara penyelenggaraan entitas pada sektor publik yang memiliki tiga pokok utama, yakni: ekonomi, efisiensi, serta efektivitas (Mardiasmo, 2018).

- 1) Ekonomi yaitu perolehan masukan (*input*) dengan kuantitas serta kualitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi adalah membandingkan *input* dengan nilai *input* yang dijelaskan dalam satuan uang. Ekonomi tergantung selama entitas publik dapat meminimalkan sumber daya masukan yang dipakai untuk mencegah pemborosan dan pengeluaran yang tidak bermanfaat.
- 2) Efisiensi yaitu tercapainya *output* secara maksimal dengan *input* tertentu atau pemakaian *input* yang paling rendah agar mendapatkan *output* tertentu. Efisiensi yaitu perbandingan antara *output/input* yang dihubungkan dengan standarisasi kinerja atau sasaran yang sudah ditentukan.
- 3) Efektivitas yaitu taraf tercapainya hasil kegiatan terhadap tujuan yang ditentukan. Secara singkat, efektivitas adalah *outcome* dibandingkan dengan *output*.

Secara bagan, *Value for Money* dapat diskemakan sebagai berikut (Mardiasmo, 2018):

Gambar 2.2
Skema *Value for Money*



(Sumber: Buku Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru" 2018)

- *Input* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas, program, dan kebijakan.
- *Output* adalah tujuan yang ingin dihasilkan dari suatu aktivitas, program, serta kebijakan.
- Sasaran antara (*throughput*) bisa dijadikan sebagai alat ukur apabila data *output* yang sebenarnya tidak tersedia.
- *Outcome* adalah akibat yang timbul dari kegiatan tertentu.

Value for Money bisa dicapai jika instansi telah memakai biaya masukan yang terendah untuk mendapatkan kinerja yang optimal guna mendapatkan tujuan dari instansi. Penerapan *Value for Money* dalam entitas publik secara intensif dilakukan sesuai dengan pelaksanaan *good governance* dan persyaratan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

2.1.5.2. Manfaat Penerapan *Value for Money*

Manfaat penerapan *Value for Money* di entitas sektor publik antara lain, yaitu (Mardiasmo, 2018):

- 1) Menaikkan mutu pelayanan.

- 2) Meningkatkan keefektifitasan layanan publik, dalam artian layanan yang diberikan sesuai dengan target.
- 3) Merendahkan biaya layanan publik karena ketakefisienan yang hilang serta pengiritan yang terjadi dalam pemakaian *input*.
- 4) Menaikkan kesadaran bahwa uang publik merupakan dasar penerapan akuntabilitas publik.
- 5) Kuota belanja yang lebih berfokus terhadap kepentingan publik.

Dilihat dari beberapa fungsi tersebut, sehingga ditarik kesimpulan jika implementasi *Value for Money* dalam mengukur kinerja lembaga sektor publik bermanfaat untuk lembaga pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terarah agar tercipta kualitas layanan yang bagus menggunakan sumber daya yang efisien serta ekonomis.

2.1.5.3. Tahapan dalam Pengukuran *Value for Money*

1) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya memperhitungkan *input* yang dipakai. Ekonomi adalah membandingkan *input* dengan *output* yang dinyatakan dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2018). Pengukuran ekonomi membutuhkan data anggaran yang dikeluarkan beserta realisasi. Untuk menilai tingkat ekonomis sebuah anggaran jika dinilai dari pengeluaran yang telah dilakukan (Dwinanda, 2018). Secara matematis, berikut rumus untuk pengukuran tingkat ekonomis:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Nilai *Input* : Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Tabel 2.1
Kriteria Ekonomis

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100%	Ekonomis
100%	Ekonomis Berimbang
> 100%	Tidak Ekonomis

(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik" 2018)

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dinilai menggunakan perbandingan *output* dengan *input*. Efisiensi adalah aspek penting dari ketiga konsep *Value for Money*. Jika tingkat *output* semakin tinggi dibandingkan dengan *input*, maka level keefisienan suatu organisasi juga semakin tinggi (Mardiasmo, 2018). Secara matematis, berikut merupakan formula perhitungan efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Input : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Tabel 2.2
Kriteria Efisien

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100%	Efisien
100%	Efisien Berimbang
>100%	Tidak Efisien

(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik" 2018)

3) Pengukuran Efektifitas

Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan suatu lembaga untuk mendapatkan tujuan organisasi. Jika suatu organisasi telah berhasil memperoleh tujuannya, sehingga entitas tersebut telah dinyatakan berfungsi secara efektif. Efektifitas hanya menilai apakah suatu kegiatan atau program sudah memperoleh tujuan yang sudah ditentukan (Mardiasmo, 2018). Secara matematis, berikut merupakan rumus dalam pengukuran efektifitas:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Output : Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Tabel 2.3
Kriteria Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100%	Tidak Efektif
= 100%	Efektifitas Berimbang
>100%	Efektif

(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik" 2018)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan baik dari hal subjek penelitian dan atau variabel amatan utama. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang serupa:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Objek dan Subjek	Metode	Hasil Penelitian
1	Hiktaop dan Asrudi (2020)	Telaah Kinerja Keuangan Berbasis <i>Value for Money</i>	Lima Belas Kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua.	Deskriptif Kualitatif	Rasio ekonomi, menyatakan bahwa kinerja keuangan sudah memenuhi kondisi ekonomis. Kinerja keuangan menurut aspek efisiensi sudah memenuhi kondisi efisiensi. Kinerja keuangan menurut aspek efektif termasuk pada kategori relatif efektif.
2	Wulandari dan Rosalin (2017)	Analisis Kinerja Keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dengan Penerapan <i>Value for Money</i> Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang	Data laporan anggaran belanja dan anggaran pendapatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang	Kualitatif Deskriptif	Kinerja (Seran, 2021) keuangan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor kota Palembang tahun 2017 menunjukkan rasio ekonomi sebesar 102,31 % (ekonomis), rasio Efisien sebesar 127,04% (tidak efisien) dan rasio efektivitas sebesar 146.18 % (efektif).
3	Putri dan Susliyanti (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan <i>Value for Money</i>	Dokumen APBDes didesa Jambidan pada tahun anggaran 2014-2016	Deskriptif Kuantitatif	Secara keseluruhan, pemerintah desa Jambidan mampu mengelola keuangan desa di tahun anggaran 2014 sampai 2016 secara baik dengan pendekatan <i>Value for Money</i> .

4	Yulianis (2019)	Analisis Kinerja Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Melalui Pendekatan <i>Value for Money</i>	Objek penelitian yang digunakan adalah pada tahun akademik 2014-2015, 2015-2016 serta 2016-2017.	Deskriptif Kualitatif	Kinerja pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat senilai 83%, serta dinilai layak ekonomis. Evaluasi kinerja berdasarkan <i>Critical Success Factor</i> menunjukkan bahwa evaluasi siswa terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap tenggat waktu, karyawan yang berkualitas serta terlatih, dosen yang berkualitas, sistem pengajaran yang efektif. Peralatan dan infrastruktur yang efisien serta jujur telah meningkat, meskipun tidak signifikan. .
5	Indrayani dan Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value for Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian dengan indikator ekonomi pada tahun 2014-2016 memiliki nilai ekonomis. Efisiensi tersebut dinilai cukup baik., namun, menunjukkan nilai yang kurang efisien pada tahun 2015. Tetapi secara menyeluruh kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah efisien. Tingkat efektifitas pada periode tersebut dinilai tidak efektif karena kurang dari 100%.
6	Sasmita (2020)	Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value for Money</i> Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPKAD Kab. Oki periode 2017-2019	Deskriptif Kualitatif	Rasio ekonomi selama tahun 2017-2019 dikategorikan ekonomis. Rasio efisiensi selama tahun penelitian rasio termasuk dalam kategori efisien. Sedangkan rasio efektivitas dimana persentase rasio dibawah

					100% menunjukkan bahwa rasio ini dianggap tidak efektif.
7	Hamid dan Lamuda (2019)	Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan <i>Value for Money</i>	Laporan Realisasi APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2016.	Deskriptif kuantitatif	Hasil dalam penelitian ini jika dilihat dari aspek ekonomi, efektifitas dan efisiensi yang menggunakan pendekatan <i>Value for Money</i> semuanya mempengaruhi kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013-2016.
8	Annafi Indra Tama (2017)	Perspektif <i>Value for Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD di Propinsi Jawa Barat dari tahun 2013-2015.	Kuantitatif	Tingkat ekonomis pada tahun 2013-2015 rasio tidak sesuai dengan standar ekonomis. Tingkat efisiensi terus meningkat tetapi rasio kurang dari 100% sehingga belum memenuhi standar efisien. Rasio efektivitas pada tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai efektivitas kurang dari 100% namun pada tahun 2015 Turun menjadi 97,48% namun masih tergolong efektif.
9	Nur Awaali Reski, Darmawati, dan Andi Kusumawati (2021)	<i>Performance Measurement Using Value for Money Concept in Village Government</i>	Pemerintah Desa Jabal Nur, Kec. Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015-2019	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah dikatakan ekonomis, dari segi efisiensi kinerja pemerintah sudah efisien walaupun 3 tahun pertama berada pada efisiensi yang seimbang, namun pada tahun ke 4 dan 5 tingkat efisiensinya mengalami peningkatan, dan dari segi efektifitas kinerja pemerintah desa Jabal Nur telah efektif .

10	(Seran, 2021)	<i>Value for Money:</i> Analisis Dampak Pemerintah Desa Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Desa Subun Bestobe	Pemerintah Desa di Desa Subun Bestobe	Kuantitatif	Rasio ekonomi berada pada tingkat yang sangat ekonomis, sedangkan pada penilaian rasio efisiensi kinerja pengelolaan keuangan desa berada pada tingkat yang tidak efisien. Dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan desa, rasio efektivitas berada pada tingkat yang sangat efektif.
----	---------------	--	--	-------------	--

Dari penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dari beberapa penelitian diatas metode penelitian yang digunakan merupakan kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaan pada penelitian ini terletak pada konsep *Value for Money* yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu penelitian secara ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengamati suatu kejadian dalam kondisi sosial secara alami dengan menekankan pada proses interaksi komunikatif secara mendalam antara fenomena yang diteliti dengan peneliti (Herdiansyah, 2019). Sedangkan Penelitian deskriptif berkaitan dengan gejala, fakta atau peristiwa secara sistematis dan tepat, berkaitan dengan karakteristik wilayah atau populasi tertentu. Penelitian deskriptif umumnya tidak harus menemukan atau menjelaskan hubungan kompetitif serta menguji hipotesis (Hardani, 2020). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme ialah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dari kenyataan yang ada serta bagaimana kenyataan itu bekerja sesuai dengan kenyataannya (Diamastuti, 2019).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan keadaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan apabila dinilai atau dilihat menggunakan konsep *Value for Money*. Dengan cara menghimpun serta menampilkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, realisasi pendapatan serta belanja daerah Kabupaten Lamongan. Akhirnya dapat memberi gambaran yang lumayan jelas untuk dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat didasarkan pada referensi, hasil studi terdahulu, disarankan dari pembimbing atau orang yang dianggap ahli, serta pengalaman. Fokus penelitian masih bersifat sementara serta dapat berkembang setelah penelitian di lapangan (Hardani, 2020) . Fokus pada penelitian ini terletak pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan yaitu 9 November 2021 – 28 Januari 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini peneliti memakai dua sumber data, diantaranya adalah sebagai berikut:

3.4.1. Data Primer

Data primer yaitu data dalam penelitian yang didapatkan secara langsung dari lapangan serta tanpa perantara. Data primer suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, wawancara, observasi, dan lain-lain (Hardani, 2020) . Data primer pada penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder ialah olahan dari data primer serta data berasal dari laporan yang sudah dibuat oleh pihak lain. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung dari kantor, maupun orang lain dalam bentuk profil, pustaka, laporan, atau pedoman (Hardani, 2020). Dalam penelitian ini data sekundernya yaitu data kuantitatif dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020 serta dokumen lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu tahapan strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan penting dalam penelitian yaitu untuk memperoleh data. Tidak adanya pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan (Hardani, 2020). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu pengamatan langsung, wawancara, serta dokumentasi. Untuk memperoleh kelengkapan informasi, maka teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1. Teknik wawancara

Wawancara dipakai sebagai teknik dalam mengumpulkan data apabila peneliti menginginkan studi terdahulu agar mendapatkan permasalahan yang penting untuk di teliti, bahkan apabila peneliti ingin mengerti sesuatu dari responden secara mendalam dengan sedikit jumlah respondennya. (Sugiyono, 2013). Wawancara yang

dilakukan pada penelitian ini meliputi beberapa staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Berikut ini merupakan daftar narasumber:

Tabel 3.1
Data Narasumber dalam Penelitian

No	Nama	Bagian
1.	Bapak Catur Subagio	Sekretariat BPKAD
2.	Bapak Dwi H P	Kasubid Fasilitasi dan Pembinaan
3..	Ibu Marsiti	Staf Bidang Perbendaharaan
4.	Ibu Tri Handayani	Staf Bidang Akuntansi

3.5.2. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani, 2020). Pada penelitian ini dilakukan dengan observasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020.

3.5.3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti tulisan penting yang memuat informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu pengumpulan data yang didapatkan melalui kumpulan dokumen (Hardani, 2020). Dokumentasi yang dapat diambil dari penelitian ini dalam bentuk dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020 serta dokumen lainnya.

3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang dipengaruhi oleh konsep keandalan (reliabilitas) serta kesahihan (validitas) tergantung pada bentuk *positivitime* serta diselaraskan menurut kebutuhan pengetahuan, ukuran serta paradigma penelitian kualitatif itu sendiri (Hardani, 2020). Menurut (Sugiyono, 2013) triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi untuk sumber data yang sama secara bersama-sama. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan hasil secara rinci dari data yang telah ditemukan saat penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan sistematis meneliti serta merangkai data yang didapatkan dari catatan lapangan, wawancara yang dihasilkan, serta dokumentasi yang diperoleh saat di lapangan, dengan bentuk mengorganisasi data ke dalam golongan, lalu menggambarkannya ke dalam bagian-bagian, mensintesiskannya, mengorganisasikannya menjadi model, menentukan bagian yang penting serta akan di pelajari, kemudian menyimpulkan agar mudah dimengerti oleh mereka sendiri serta oleh orang lain (Hardani, 2020). Miles dan Huberman memuat tahapan pada proses analisis data sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data (*Collecting*), dalam hal ini mengacu pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Lamongan yang diperoleh pada saat di lapangan.
- 2) Reduksi data (*Data Reduction*) merupakan bagian dari analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan yang berlebihan, dan mengatur dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Hardani, 2020).
- 3) Penyajian data (*Data Display*) menurut Miles dan Huberman, ialah kumpulan informasi teratur yang dimungkinkan terdapat penarikan kesimpulan serta pengutipan tindakan (Hardani, 2020). Teks yang sering kali dipakai dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono, 2013).
- 4) Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Kesimpulan pertama yang akan disarankan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika didapatkan fakta-fakta konkrit yang membawa pada langkah pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika simpulan yang dinyatakan pada langkah pertama, dibantu dengan fakta-fakta yang konkrit dan konsisten saat peneliti mengulang untuk menghimpun data ke lapangan, maka kesimpulan yang dinyatakan adalah kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan yaitu salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.812,8 KM² atau kurang lebih 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 KM², maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah sekitar 902,4 KM² jika dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 462 desa dan 12 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2019 sebesar 1.373.390 jiwa dengan jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Mantup sebesar 96.542 jiwa kemudian Kecamatan Glagah sebesar 90.784 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Bluluk sebesar 21.704 jiwa.

Jika dilihat dari sumber daya alam yang ada, Kabupaten Lamongan memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian khususnya terlihat pada sub tanaman pangan dan sub perikanan. Dengan total lahan sawah seluas 83.213 Hektare, Kabupaten Lamongan merupakan terbesar kedua produksi gabah serta terbesar kelima terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung. Pada sub sektor perikanan Kabupaten Lamongan mampu menghasilkan produksi ikan terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo. Disamping itu, Kabupaten

Lamongan juga memiliki beberapa sektor unggulan seperti industri pengolahan, bangunan/ konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, hiburan dan rekreasi. Dengan terus menerus meningkatkan potensi sumber daya Kabupaten Lamongan, sehingga nantinya akan dapat untuk meningkatkan pajak daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih maksimal.

1) Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada $6^{\circ} 51' 54''$ sampai dengan $7^{\circ} 23' 6''$ Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur $112^{\circ} 4' 41''$ sampai $112^{\circ} 33' 12''$ bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan dilewati oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara umum daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

- Bagian Selatan serta Utara: yaitu kesuburan sedang dengan daerah pegunungan kapur berbatu
- Bagian Tengah Selatan: yaitu tanah relatif subur dengan daerah dataran rendah
- Bagian Tengah Utara: yaitu daerah yang rawan banjir atau daerah bonorowo

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara dengan 181.280 Ha atau + 3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan garis pantai sepanjang 47 Km. Batas wilayah secara administratif Kabupaten Lamongan yaitu:

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Mojokerto dan Kab. Jombang

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Tuban dan Kab. Bojonegoro
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Gresik

2) Lambang Kabupaten Lamongan

Gambar 4.1
Logo Kabupaten Lamongan



Sumber: <https://lamongankab.go.id>

Makna lambang dari Kabupaten Lamongan antara lain (Dukhan, 2022):

- a) Segilima sama sisi: Memiliki lambang dasar Negara Pancasila
- b) Bintang: Terdapat sebuah bintang berwarna kuning yang memiliki pancaran sinar yang terang ke berbagai penjuru. Bintang pada lambang Kabupaten Lamongan menggambarkan sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa
- c) Keris: Mempunyai arti kewaspadaan
- d) Bukit atau gunung yang tidak berapi: yang berarti Lamongan juga mempunyai wilayah yang terdiri dari daerah yang berbukit atau pengunungan yang di dalamnya mempunyai sumber daya alam yang berguna sebagai pembangunan Kabupaten Lamongan

- e) Ikan Lele: Memiliki arti sikap sabar, ulet, tahan menderita akan tetapi jangan mengganguya karena ikan lele mempunyai patil untuk senjata
 - f) Ikan Bandeng: Memiliki arti potensi komoditi yang dihasilkan oleh Kabupaten Lamongan
 - g) Air beriak di dalam tempayan: Melambangkan bahwa air selalu menjadi menjadi masalah di Kabupaten lamongan
 - h) Tempayan batu: Memiliki arti tempat air bersih yang dapat diambil oleh siapapun yang membutuhkan
 - i) Padi dan Kapas: Memiliki arti kemakmuran rakyat dalam artian warga Lamongan memiliki kecukupan pangan, sandang, dan lain sebagainya.
- 3) Visi dan Misi Kabupaten Lamongan
- Visi Kabupaten Lamongan yaitu “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan” (Lamongan, 2022).
 - Misi kabupaten Lamongan (Lamongan, 2022):
 - a) Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan pengoptimalan berbagai potensi serta sektor unggulan, pengetahuan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*)
 - b) Mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, daya saing, dan berakhlakul karimah dalam rangka menyambut 4.0
 - c) Membangun infrastruktur yang mantap, merata, dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan

- d) Menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan
- e) Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang religious, berbudaya, aman, dan tentram dalam relasi yang seimbang antara berbagai komponen dengan tidak meninggalkan kearifan lokal masyarakat dan *stakeholder* pembangunan.

4.1.2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1) Profil BPKAD Kabupaten Lamongan

Merupakan instansi yang memiliki urusan penunjang pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan serta aset daerah yang beralamatkan di Jl Basuki Rahmat Nomor 02, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memiliki visi yaitu “Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah” (BPKAD, 2022) . Adapun misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelayanan keuangan daerah, manajemen dan sistem/prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan aset/barang daerah
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah

- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan aset/barang daerah (BPKAD, 2022).

Setiap Badan atau Organisasi memiliki struktur organisasi tersendiri agar organisasi atau badan agar dapat berjalan secara efektif. Berikut ini wawancara peneliti dengan Bapak Catur Subagio selaku sekretariat BPKAD:

“Untuk susunan organisasi BPKAD beserta tugas dari masing-masing bagian BPKAD kami merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD Kabupaten Lamongan dalam penyusunan struktur organisasi berpacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Kemudian ditidak lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 83 tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Saat melaksanakan kedudukan, tugas pokok serta fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas: Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Lamongan, memiliki fungsi:

- a) Membina serta melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan serta layanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c) Merumuskan kebijakan teknis serta strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (BPKAD K. 1., 2018).

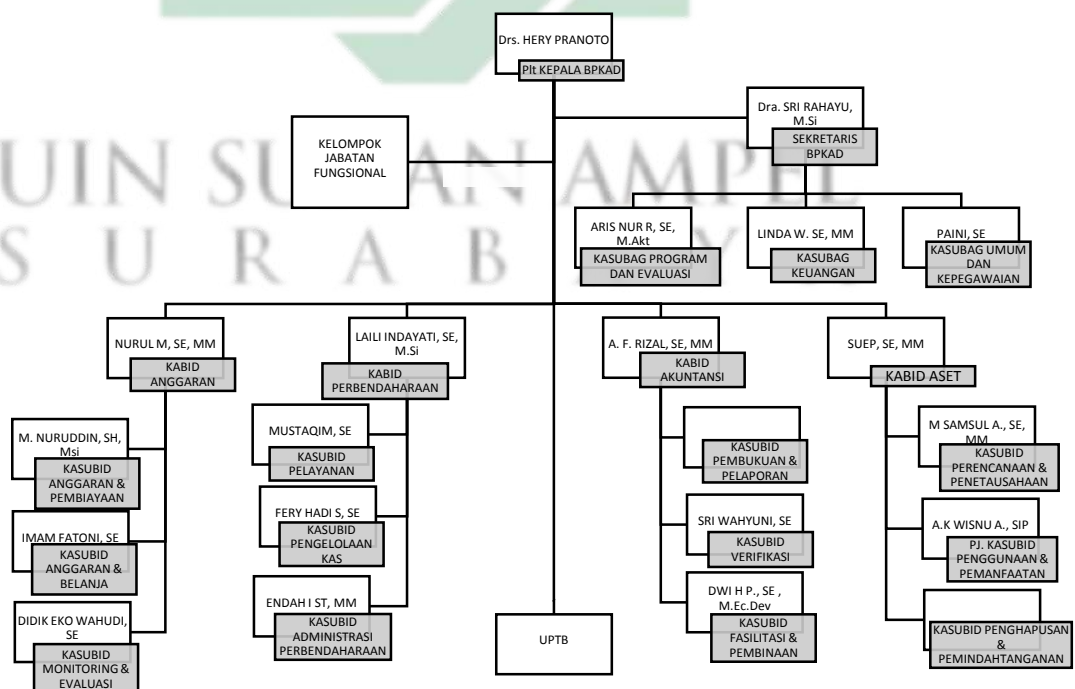
Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat susunan organisasi yang terdiri atas:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat
- c) Bidang Anggaran
 - (1) Anggaran dan Pembiayaan
 - (2) Anggaran dan Belanja
 - (3) Monitoring dan Evaluasi
- d) Bidang Perbendaharaan
 - (1) Pelayanan
 - (2) Pengelolaan Kas
 - (3) Administrasi Perbendaharaan
- e) Bidang Akuntansi
 - (1) Pembukuan dan Pelaporan

- (2) Verifikasi
- (3) Fasilitasi dan Pembinaan
- f) Bidang Aset
 - (1) Perencanaan dan Penatausahaan
 - (2) Penggunaan dan Pemanfaatan
 - (3) Penghapusan dan Pemindahtanganan
- g) UPT Badan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan:

Gambar 4.2
Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan



(Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)

4.2 Hasil

4.2.1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020

Berikut ini merupakan ringkasan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan tahun 2017

Uraian	2017	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	2.779.816.159.236,60	2.716.042.671.044,82
Pendapatan Asli Daerah	436.519.037.265,60	429.200.063.876,82
Pendapatan Transfer	1.844.705.926.571,00	1.788.299.103.168,00
Bantuan Keuangan	413.436.424.000,00	413.436.424.000,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	85.154.771.400,00	85.107.080.000,00
Belanja	2.303.913.735.159,79	2.193.887.808.152,50
Belanja Operasi	1.783.028.548.824,79	1.688.666.218.567,50
Belanja Modal	519.885.186.335,00	505.221.589.585,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00
Transfer	537.714.779.557,10	535.701.374.483,10
Penerimaan Daerah	96.362.355.480,29	96.392.975.480,29
Pengeluaran Daerah	34.550.000.000,00	32.550.000.000,00
Pembiayaan Bersih	61.812.355.480,29	63.842.975.480,29
SILPA	0,00	50.296.463.889,51

(Sumber: Laporan Realisasi APBD 2017 Kabupaten Lamongan)

Tabel diatas merupakan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017. Dari tabel diatas terlihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp50.296.463.889,51.

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan tahun 2018

Uraian	2018	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	2.904.634.147.135,00	2.811.062.543.333,02
Pendapatan Asli Daerah	495.857.330.740,00	436.595.179.671,02
Pendapatan Transfer	1.895.636.648.895,00	1.862.466.562.171,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	513.140.167.500,00	512.000.801.491,00
Belanja	2.948.874.041.024,51	2.812.188.903.958,02
Belanja Operasi	2.382.296.028.793,51	2.280.377.555.799,98
Belanja Modal	565.576.012.231,00	531.811.3348.158,04
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00
Transfer	1.806.570.000,00	1.681.968.970,00
Penerimaan Daerah	74.596.463.889,51	74.644.463.889,51
Pengeluaran Daerah	28.550.000.000,00	28.500.000.000,00
Pembiayaan Bersih	46.046.463.889,51	46.144.463.889,51
SILPA	0,00	43.336.134.294,51

(Sumber: Laporan Realisasi APBD 2018 Kabupaten Lamongan)

Tabel diatas merupakan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2018.

Dari tabel diatas terlihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp43.336.134.294,51.

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan tahun 2019

Uraian	2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,66
Pendapatan Asli Daerah	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86
Pendapatan Transfer	1.944.868.051.281,00	1.859.746.718.193,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah	535.761.934.000,00	532.747.170.060,00
Belanja	3.036.828.261.480,51	2.873.788.023.089,60
Belanja Operasi	1.936.953.407.178,51	1.812.335.676.455,00
Belanja Modal	526.317.414.106,00	490.432.716.464,10
Belanja Tak Terduga	150.000.000,00	0,00
Transfer	575.214.010.196,00	572.743.825.258,00
Penerimaan Daerah	65.886.134.294,51	64.912.753.267,51
Pengeluaran Daerah	25.050.000.000,00	23.725.000.000,00
Pembiayaan Bersih	40.836.134.294,51	41.187.753.267,51
SILPA	0,00	30.172.246.506,77

(Sumber: Laporan Realisasi APBD 2019 Kabupaten Lamongan)

Tabel diatas merupakan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Dari tabel diatas terlihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp30.172.246.506,77.

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan tahun 2020

Uraian	2020	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	2.974.914.693.684,05	2.838.272.211.782,49
Pendapatan Asli Daerah	483.583.044.116,57	481.752.331.399,49
Pendapatan Transfer	1.835.930.275.505,48	1.702.108.557.689,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	655.401.374.062,00	654.411.322.694,00
Belanja	2.405.708.360.190,82	2.217.800.561.599,77
Belanja Operasi	1.992.764.439.509,82	1.861.982.448.324,36
Belanja Modal	358.943.920.681,00	325.359.777.833,41
Belanja Tak Terduga	54.000.000.000,00	30.458.335.442,00
Transfer	605.778.580.000,00	605.337.364.515,00
Penerimaan Daerah	43.522.246.506,77	43.165.160.938,77

Pengeluaran Daerah	6.950.000.000,00	6.875.000.000,00
Pembiayaan Bersih	36.572.246.506,77	36.290.160.938,77
SILPA	0,00	51.424.446.606,49

(Sumber: Laporan Realisasi APBD 2020 Kabupaten Lamongan)

Tabel diatas merupakan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020. Dari tabel diatas terlihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp51.424.446.606,49.

4.2.2. Data Wawancara

Wawancara pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dimulai pukul 10.30 WIB. Wawancara kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 10.45 WIB. Wawancara dilaksanakan di kantor BPKAD Kabupaten Lamongan. Wawancara pertama dilakukan dengan 3 (tiga) narasumber yaitu Bapak Catur Subagio, Ibu Marsiti, Ibu Tri Handayani. Kemudian wawancara kedua dengan narasumber Bapak Dwi H P.

Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Catur Subagio selaku bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Lamongan. Topik wawancara ini yaitu mengenai BPKAD Kabupaten Lamongan serta Pemerintah Kabupaten Lamongan. Disini Bapak Catur Subagio menjelaskan tentang BPKAD Kabupaten Lamongan secara umum serta menunjukkan dokumen mengenai rencana strategi perubahan BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Didalam dokumen tersebut memuat visi misi, sasaran, tujuan serta kebijakan, serta rencana program pada tahun 2016-2021.

Kemudian wawancara dilanjutkan lagi pukul 12.45 WIB kepada narasumber selanjutnya yaitu Ibu Marsiti selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kabupaten Lamongan. Pertanyaan pertama, dimulai mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan berpedoman pada peraturan apa. Ibu Marsiti menjelaskan:

“Dalam pengelolaan keuangan daerah itu dik BPKAD berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.”

Pertanyaan berlanjut sejak kapan Peraturan Pemerintah tersebut diterapkan di BPKAD Kabupaten Lamongan. Beliau menjelaskan:

“Peraturan tersebut sudah diterapkan semenjak peraturan tersebut keluar dan BPKAD sendiri sudah mengadakan pelatihan mengenai peraturan itu dik tahun 2019 bulan September-an.”

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ketika data yang diminta harus selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Beliau menjawab:

“Melaksanakan tugas serta tanggungjawab secara baik dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.”

Pertanyaan berlanjut mengenai perancangan dan penyusunan Laporan Keuangan apakah Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menggunakan sistem informasi yang berbasis digital. Ibu Marsiti mengatakan:

“Iya betul dik, kita sudah menggunakan sistem informasi sejak lama namanya itu Aplikasi SAKTI atau Aplikasi Keuangan Akuntansi semuanya sudah ada di aplikasi itu dik.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Laporan Keuangan berpedoman pada peraturan apa. Beliau mengatakan:

“Untuk Laporan Keuangan kita memakai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.”

Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mungkin ada kendala dalam penerapan PP tersebut. Ibu Marsiti menyatakan:

“Alhamdulillah dik, untuk sekarang sudah tidak ada kendala, mungkin pas awal-awal kita masih penyesuaian itu banyak masalah. Tapi untuk sekarang tidak ada dik.”

Lalu pertanyaan berlanjut apa yang dimaksud dengan surplus APBD, lalu tindakan apa yang akan diambil jika hal tersebut terjadi. Ibu Marsiti menjawab:

“Surplus sendiri kan selisih antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang sama. Surplus bisa terjadi apabila jumlah pendapatan itu lebih besar daripada belanjanya. Lalu tindakan apa yang akan diambil yaitu bisa dengan cara dianggarkan oleh daerah untuk pemberian pinjaman ke pusat atau daerah, melakukan pembayaran pokok utang atau investasi.”

Pertanyaan selanjutnya menanyakan mengenai defisit APBD, apa yang dinamakan dengan defisit APBD, kemudian tindakan apa yang akan diambil jika hal tersebut terjadi. Beliau menjawab:

“Nah sekarang untuk defisit APBD ya dik, Defisit APBD itu kan selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah di tahun yang sama. Defisit itu dapat terjadi jika jumlah pendapatan kurang dari jumlah belanja. Apabila mengalami defisit, maka hal tersebut dapat dibiayai dari penerimaan pembiayaan.”

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah sisa anggaran tahun lalu dapat dijadikan sumber penerimaan tahun berikutnya. Ibu Marsiti menyatakan:

“Sisa anggaran tahun lalu itu dapat dijadikan penerimaan tahun selanjutnya. Nah dikelompokkannya itu dalam penerimaan pembiayaan daerah.”

Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah semua transaksi keuangan dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Beliau menjelaskan:

“Saya rasa semua transaksi telah dicatat dan didokumentasikan secara baik dik.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), bagaimana jika hasilnya negatif. Beliau menjawab:

“Itu berarti pembiayaan neto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Jika hasil SILPA negatif dapat dilakukan dengan cara mengurangi belanja dan atau/ mengurangi pengeluaran pembiayaan sehingga SILPA sama dengan nihil atau nol.”

Lalu dalam menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran serta pertanggungjawaban apakah sudah disampaikan secara tepat waktu.

Beliau menyatakan:

“Iya sudah tepat waktu dik.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ibu Marsiti menjawab:

“Sudah dik, untuk LRA, APBD, P-APBD semua ada di website resmi kita. Selain itu kita juga menyampaikannya melalui koran sehingga

untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses internet bisa membaca koran tersebut.”

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai perbendaharaan apakah seorang bendahara pengeluaran dapat menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Beliau mengatakan:

“Kita sebagai bendahara pengeluaran bisa saja menolak perintah dari PA, karena mungkin dari perintahnya itu tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga kita bisa menolaknya.”

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat larangan-larangan dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pemasukan atau bendahara pengeluaran, jika ada dilarang apa saja. Beliau menyatakan:

“Pasti ada larangan-larangan dalam menyampaikan tugas itu dik, seperti halnya kita itu tidak boleh menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan lain atas nama pribadi.”

Pertanyaan berikutnya yaitu apakah terdapat perbedaan tugas antara bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu. Ibu Marsiti menjawab:

“Ada beberapa perbedaan pada tugas sih dik, lalu ada juga beberapa pelimpahan tugas dari bendahara pengeluaran yang dilimpahkan ke bendahara pengeluaran pembantu.”

Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni apakah bendahara pengeluaran dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. Beliau menyatakan:

“Bisa dik, jadi kita itu bisa usul kepada Kepala SKPD untuk dapat menetapkan pegawai yang membantu bendahara pengeluaran.”

Pertanyaan terakhir yaitu bendahara pengeluaran itu menyampaikan pertanggungjawaban kepada siapa. Ibu Marsiti menjawab:

“Untuk penyampaian tanggungjawab kita menyampaikan LPJ ke Pengguna Anggaran biasanya paling lambat tanggal 10 pada bulan selanjutnya.”

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Tri Handayani selaku narasumber ketiga yang juga bekerja sebagai staf di bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan. Wawancara dimulai sekitar pukul 14.00 WIB yang dilakukan di ruang bidang akuntansi. Pertanyaan pertama yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan berpedoman pada peraturan apa. Ibu Handayani menjelaskan:

“Untuk pengelolaan keuangan daerah mbak, kita mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu peraturan terbaru mengenai pengelolaan keuangan daerah.”

Kemudian pertanyaan berlanjut sejak kapan Peraturan Pemerintah tersebut diterapkan di BPKAD Kabupaten Lamongan. Ibu Handayani menyatakan:

“Peraturan itu telah digunakan sejak peraturan itu keluar. BPKAD sudah menyelenggarakan pelatihan mengenai peraturan ini sekaligus ada pembahasan mengenai penyusunan anggaran 2020 sekitar tiga tahun lalu.”

Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ketika data yang diminta harus selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Beliau menjawab:

“Kita harus sadar kalau tugas yang telah diberikan itu harus diselesaikan dengan baik tapi kita juga harus tetap berpacu pada Undang-Undang yang berlaku.”

Pertanyaan berlanjut mengenai perancangan dan penyusunan Laporan Keuangan apakah Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menggunakan sistem informasi yang berbasis digital. Ibu Handayani mengatakan:

“BPKAD sudah menggunakan sistem informasi berbasis digital sejak lama. Namanya itu SAKTI mbak, selain ASN yang berkualitas, SAKTI juga membantu kita memperoleh penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI selama lima tahun berturut.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada peraturan apa. Beliau mengatakan:

“Kami menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan.”

Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mungkin ada kendala dalam penerapan. Beliau menyatakan:

“Kalau menurut saya sih tidak ada kendala, karena PP ini juga sudah lama diterapkannya.”

Lalu pertanyaan berlanjut apa yang dimaksud dengan surplus APBD, lalu tindakan apa yang akan diambil jika hal tersebut terjadi. Beliau mengatakan:

“Surplus itu selisih yang terjadi jika jumlah pendapatan itu lebih besar daripada belanjanya di periode anggaran yang sama. Jika terjadi surplus APBD maka bisa digunakan sebagai pembayaran hutang/pinjaman atau mungkin kita bisa memberikan dana pinjaman ke daerah lain.”

Pertanyaan kemudian menanyakan mengenai defisit APBD, apa yang dinamakan dengan defisit APBD, kemudian tindakan apa yang akan diambil jika hal tersebut terjadi. Beliau menjawab:

“Kalau defisit APBD itu selisih kurang antara pendapatan sama belanja daerah. Defisit bisa terjadi jika jumlah belanja lebih besar dari jumlah pendapatan. Jika defisit terjadi, maka penerimaan pembiayaan dapat membiayainya.”

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah sisa anggaran tahun lalu dapat dijadikan sumber penerimaan tahun berikutnya. Beliau menyatakan:

“Bisa mbak, dikelompokannya di penerimaan pembiayaan.”

Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah semua transaksi keuangan dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Beliau menjawab:

“Sudah mbak, sudah dicatat serta didokumentasikan secara baik”

Pertanyaan selanjutnya yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), bagaimana jika hasilnya negatif. Beliau menjawab:

“SILPA negatif itu karena defisit anggaran tidak dapat ditutup oleh pembiayaan neto. Apabila hal tersebut terjadi maka bagaimana caranya SILPA harus sama dengan nol biasanya mengurangi belanja.”

Lalu dalam menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran serta pertanggungjawaban apakah sudah disampaikan secara tepat waktu. Ibu

Handayani menjawab:

“Saya rasa sudah tepat waktu ya mbak.”

Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Beliau menyatakan:

“Kalau untuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sudah dilakukan dimana kita mempunyai web BPKAD semuanya ada disitu mulai dari kegiatan atau laporan keuangan. Setiap tahun biasanya juga ada dikoran mbak untuk realisasinya.”

Pertanyaan berlanjut yaitu menurut ibu, penting atau tidak pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money*. Ibu Handayani menjawab:

“Kalo menurut saya penting, karena pengukuran dengan *Value for Money* juga memiliki banyak manfaat bagi sektor publik khususnya bagi sektor pemerintah.”

Pertanyaan selanjutnya yakni menurut ibu, apa tujuan dari pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money*. Beliau menyatakan:

“Tujuan dari pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* itu agar instansi pemerintah bisa mengevaluasi kinerja selama periode tertentu serta meminimalisir dan pemborosan dana.”

Pertanyaan berikutnya yaitu untuk mendapatkan nilai ekonomis, apakah perlu untuk melihat perbandingan harga agar tidak terjadi pemborosan. Ibu handayani menjawab:

“Menurut saya itu tidak usah melakukan perbandingan harga mbak karena pemerintah sendiri sudah memiliki daftar harga yang nantinya tinggal dimasukkan ke anggaran sesuai daftar harga tersebut.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu dari pengukuran kinerja *Value for Money* (ekonomi, efektif, efisien) mana yang lebih sering mengalami kesulitan dalam pengukurannya. Ibu Handayani menyatakan:

“Kalo dari ketiga rasio itu biasanya yang paling sulit diukur itu efektivitas mbak. Karena hasil dari keberhasilan suatu program itu biasanya baru terlihat setelah beberapa periode tidak bisa diketahui untuk jangka pendek.”

Pertanyaan berikutnya adalah menurut ibu, dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah apakah sudah cukup dengan menggunakan *Value for Money* saja. Beliau menjawab:

“Perlu untuk ditambah sih mbak seperti menghitung keadilan dan kesetaraan itu menurut saya perlu karena pemerintah sendiri kan memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu Laporan Keuangan yang disampaikan ke BPK RI itu laporan yang seperti apa. Beliau menyatakan

“Kalau LK yang disampaikan ke BPK RI itu LK yang telah di reviu oleh Inspektorat atau Pengawas Internal.”

Pertanyaan berikutnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan itu biasanya disampaikan kapan. Ibu Handayani menjawab:

“Biasanya sih 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran mbak.”

Kemudian pertanyaan berlanjut yaitu Laporan Keuangan yang telah di periksa oleh BPK selanjutnya Laporan Keuangan tersebut disampaikan kemana. Beliau menjawab:

“Laporan yang telah di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada DPRD.”

Pertanyaan selanjutnya yakni akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan apa saja. Ibu Handayani menyatakan:

“Untuk akuntansi pemerintah daerah sendiri itu dilaksanakan berdasarkan dengan Bagan Akun Standar Daerah, kebijakan akuntansi pemerintah sama SAPD mbak.”

Pertanyaan terakhir yaitu dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, BAS untuk Daerah itu bertujuan untuk apa. Beliau menjelaskan:

“BAS itu kan Bagan Akun Standar ya mbak nah itu kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan kodifikasi akun laporan keuangan secara lengkap.”

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Dwi H P selaku narasumber keempat yang juga sebagai Kasubid Fasilitasi dan Pembinaan di bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan. Wawancara dilakukan pada

tanggal 14 Juni 2022 pukul 10.45 WIB yang dilakukan di ruang bidang akuntansi. Pertanyaan pertama menurut bapak, penting atau tidak pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money*. Bapak Dwi menjawab:

“Penting mbak, karena kinerja suatu organisasi juga dapat diketahui dengan konsep *Value for Money* tersebut. Disamping itu implementasi *Value for Money* juga dapat digunakan untuk membantah bahwa anggaran sangat dekat dengan pemborosan, kebocoran, inefisiensi.”

Pertanyaan selanjutnya yakni menurut Pak Dwi, apa tujuan dari pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money*. Beliau menjawab:

“Tujuannya agar kita dapat mengetahui kinerja organisasi selama periode tersebut setelah itu kita dapat melakukan evaluasi sebagai pertimbangan periode selanjutnya.”

Pertanyaan berikutnya yaitu untuk mendapatkan nilai ekonomis, apakah perlu untuk melihat perbandingan harga agar tidak terjadi pemborosan. Pak Dwi menyatakan:

“Kalau melihat perbandingan harga tidak perlu mbak karena kita sudah mempunyai pedoman sendiri nanti orang anggaran membuat anggaran sesuai pedoman tersebut. Selain itu ada juga agar ekonomis dengan cara tender.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu dari pengukuran kinerja *Value for Money* (ekonomi, efektif, efisien) mana yang lebih sering mengalami kesulitan dalam pengukurannya. Pak Dwi menyatakan:

“Nah, bisanya sih di nilai keefektifan karena terkadang kita butuh beberapa periode untuk dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu program.”

Pertanyaan berikutnya adalah menurut bapak, dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah apakah sudah cukup dengan menggunakan *Value for Money* saja. Beliau menjawab:

“Kalau pengukuran kinerja pada organisasi yang bukan pemerintah sebenarnya cukup saja mbak dengan *Value for Money*, tapi berhubung pemerintah daerah yang dimana tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat jadi menurut saya perlu ditambah lagi seperti keadilan dan kesetaraan.”

Pertanyaan berikutnya adalah menurut bapak, pada tahun 2017-2020 kemarin apakah ada kesulitan dalam realisasi anggaran. Beliau menjawab:

“Tahun 2017-2019 itu masih aman mbak. Kemudian pandemi datang di awal tahun nah itu yang membuat kita harus melakukan P-APBD yang di fokuskan ke Covid-19 tersebut sehingga banyak dari agenda-agenda yang harus ditunda.”

Pertanyaan berikutnya adalah menurut Pak Dwi, bagaimana dampak dari pandemi tersebut. Beliau menjawab:

“Kalau dampak dari pandemi global tersebut yang paling terlihat itu di Pendapatan Asli Daerah seperti pendapatan retribusi daerah, pajak daerah mbak karena seperti rumah makan juga banyak yang memilih tutup sehingga dapat berimbas ke pendapatan pajak daerah.”

Pertanyaan selanjutnya adalah selain dari dampak tersebut apakah ada lagi yang menyebabkan penurunan PAD Kabupaten Lamongan tahun 2020.

Pak Dwi menyatakan:

“Di sektor pariwisata kita punya WBL (Wisata Bahari Lamongan) dimana pada saat pandemi, WBL selama beberapa bulan tutup kemudian buka lagi tetapi ada pembatasan itu mbak yang juga berpengaruh ke PAD 2020.”

Pertanyaan berikutnya yaitu dalam rasio ekonomis terdapat realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah, di tahun 2020 baik realisasi maupun anggaran belanja daerah memiliki penurunan. Hal tersebut disebabkan karena apa. Beliau menjawab:

“Karena pandemi global itu tadi jadi kita lebih fokuskan ke penanganan pandemi dimana pada tahun tersebut pandemi masih gencar-

gencarnya paling banyak kita melakukan penekanan di belanja modal.”

Pertanyaan selanjutnya adalah dalam rasio efisien terdapat realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah selama tahun 2017-2020 tetap dalam keadaan efisien, hal tersebut dikarenakan apa. Beliau menyatakan:

“Hal tersebut berarti *input* kita lebih besar dari pada *output* sehingga tetap dalam rasio efisien. Meskipun di tahun 2020 realisasi pendapatan kita mengalami penurunan tapi kita harus tetap menekan di realisasi belanja daerah sehingga bisa tetap dikatakan efisien.”

Pertanyaan berikutnya adalah dalam rasio efektifitas terdapat realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan selama tahun 2017-2020 dalam keadaan tidak efektif, hal tersebut dikarenakan apa. Beliau menjawab:

“Kalau efektif itu kan berhubungan sama pendapatan. Jika dilihat dari tahun 2017-2020 realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran pendapatan yang ada. Disamping itu juga seperti yang saya katakan tadi kalau efektifitas itu lebih susah untuk dinilai dalam jangka pendek.”

Pertanyaan selanjutnya adalah menurut bapak agar suatu organisasi dapat dikatakan efektif dengan cara apa. Beliau menjawab:

“Kalau suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika *outcome* yang dihasilkan lebih besar dari pada *output*-nya. Atau dalam artian realisasinya harus lebih besar daripada yang dianggarkan sehingga nilai efektif yang dihasilkan lebih dari yang nantinya dapat dikategorikan efektif.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana agar *Value for Money* dapat tercapai. Beliau menyatakan:

“*Value for Money* dapat tercapai jika pemerintah menggunakan sumber dana paling kecil tetapi untuk hasil yang maksimal.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut bapak apakah konsep *Value for Money* ini harus tetap digencarkan atau tidak. Beliau menyatakan:

“Harus digencar seiring dilakukannya peningkatan akuntabilitas publik serta pelaksanaan *good governance*.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu selain sebagai pelaksanaan *good governance* dan peningkatan akuntabilitas publik, mungkin ada manfaat lain dari implementasi *Value for Money*. Beliau menjawab:

“Dapat meningkatkan efektivitas layanan publik, mutu layanan publik, serta meningkatkan kesadaran penggunaan uang publik.”

4.3 Pembahasan

4.3.1. Analisis *Value for Money* terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan

1) Rasio Ekonomi

Ekonomis mempunyai arti suatu perilaku atau tindakan dimana untuk mendapatkan *input* (barang atau jasa) yang memiliki kualitas terbaik dengan tingkat pengeluaran sekecil mungkin. Pengukuran ekonomi membutuhkan data anggaran yang dikeluarkan beserta realisasi. Suatu kinerja organisasi dapat dinyatakan ekonomis jika realisasi anggaran lebih kecil daripada sasaran anggaran serta bisa memperoleh *output* secara maksimal. Pada penelitian ini pengukuran rasio ekonomi yang digunakan dengan formula berikut ini:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Nilai *Input* : Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Tabel 4.5
Kriteria Ekonomis

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100%	Ekonomis
100%	Ekonomis Berimbang
> 100%	Tidak Ekonomis

(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik" 2018)

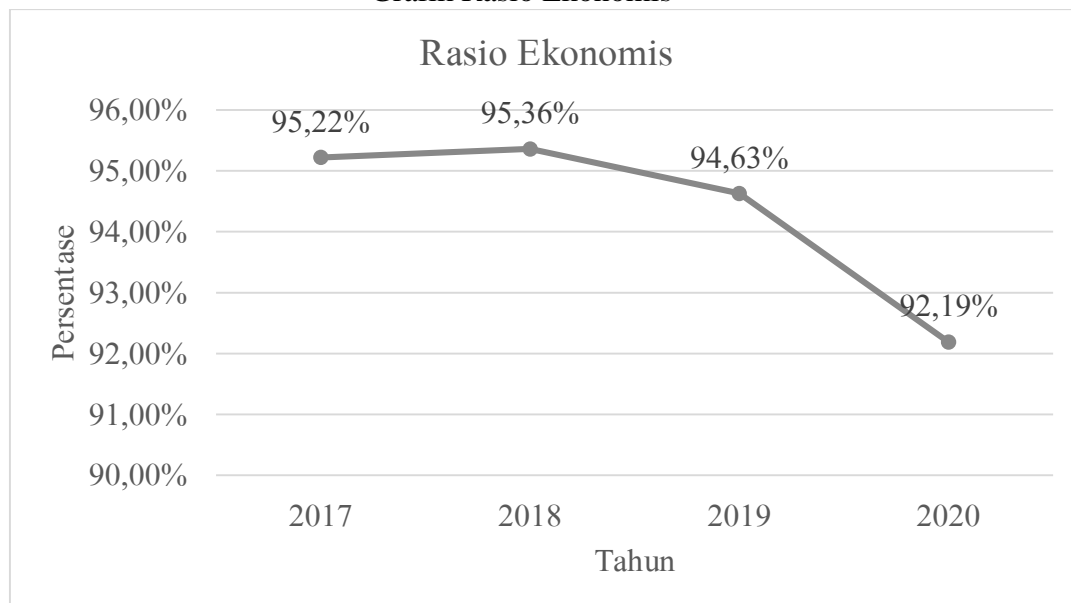
Tabel 4.6
Perhitungan Rasio Ekonomi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	%	Keterangan
2017	2.193.887.808.152,50	2.303.913.735.159,79	95,22%	Ekonomis
2018	2.812.188.903.958,02	2.948.874.041.024,51	95,36%	Ekonomis
2019	2.873.788.023.089,60	3.036.828.261.480,51	94,63%	Ekonomis
2020	2.217.800.561.599,77	2.405.708.360.190,82	92,19%	Ekonomis

(Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemkab Lamongan yang telah diolah)

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dikatakan ekonomis karena hasil perhitungan dari rasio ekonomi kurang dari 100% yang dapat dikategorikan ekonomis. Rasio ekonomis sering dikatakan sebagai penghematan yang memuat pengelolaan keuangan secara tidak boros serta cermat. Apabila digambarkan dalam grafik berikut ini merupakan grafik rasio ekonomis:

Gambar 4.3
Grafik Rasio Ekonomis



(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi yang telah diringkaskan dalam tabel beserta grafik diatas dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun (2017-2020) Pemerintah Kabupaten Lamongan telah dalam kategori ekonomis. Pada tahun 2017 rasio ekonomi mencapai 95,22% kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,14% yaitu menjadi 95,36%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,63% penurunan tersebut sebanyak 0,73%. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sekitar 2,44% menjadi 92,19%. Rata-rata nilai ekonomis pada tahun 2017-2020 yaitu senilai 94,35%.

Dalam perhitungan rasio ekonomis pada tahun 2017-2020 dapat kategori ekonomis yang berarti pemerintah dapat menekan belanja daerah sehingga tidak adanya pemborosan. Penurunan belanja dari tahun 2017-2020, paling banyak terjadi di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan

adanya pandemi global yaitu Covid-19 yang menyebabkan pemerintah harus fokus ke penanganan pandemi tersebut. Agar rasio ekonomi tetap dapat memenuhi kriteria ekonomis, Pemerintah Daerah harus menggunakan belanja daerah secara maksimal, dikarenakan biaya yang dikeluarkan sebagai belanja daerah masih kurang dari anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat sehingga dirasa belum memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Disamping itu suatu kinerja organisasi dapat dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari sasaran anggaran serta dapat memperoleh *output* yang maksimal. Ekonomi dikatakan sebagai kehematan yang memuat pengelolaan secara cermat atau dengan hati-hati sehingga tidak adanya pemborosan.

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dinilai dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Jika tingkat *output* semakin tinggi dibandingkan dengan *input*, maka level keefisienan suatu organisasi juga semakin tinggi. Suatu program bisa dikatakan efisien apabila hasil dari kegiatan tersebut sudah mencapai target dengan menggunakan sumber daya serta dana seminimal mungkin. Pada penelitian ini pengukuran rasio efisiensi dilakukan dengan formula berikut ini:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Input : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Tabel 4.7
Kriteria Efisien

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100%	Efisien
100%	Efisien Berimbang
>100%	Tidak Efisien

(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik" 2018)

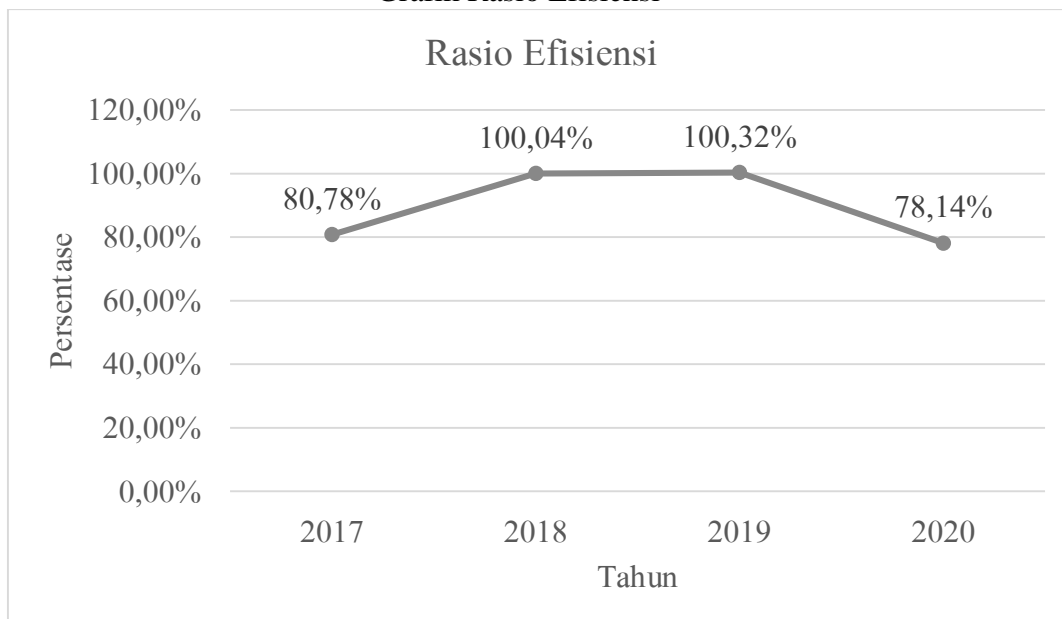
Tabel 4.8
Perhitungan Rasio Efisien

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	%	Keterangan
2017	2.193.887.808.152,50	2.716.042.671.044,82	80,78%	Efisien
2018	2.812.188.903.958,02	2.811.062.543.333,02	100,04%	Efisien Berimbang
2019	2.873.788.023.089,60	2.864.496.711.416,66	100,32%	Efisien Berimbang
2020	2.217.800.561.599,77	2.838.272.211.782,49	78,14%	Efisien

(Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemkab Lamongan yang telah diolah)

Dalam tabel perhitungan rasio efisiensi diatas, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan dalam kategori efisien meskipun pada tahun 2018 dan tahun 2019 termasuk kategori efisien berimbang. Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dikatakan efisien karena rasio yang dihasilkan tidak melebihi 1 atau kurang dari 100%. Apabila digambarkan dalam grafik berikut ini merupakan grafik rasio efisien:

Gambar 4.4
Grafik Rasio Efisiensi



(Sumber: Data diolah)

Dari grafik beserta tabel perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi pada tahun 2017 sebesar 80,78%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 19,26% menjadi 100,04%. Lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,24% sehingga menjadi 100,32%.

Akan tetapi di tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 78,14% penurunan rasio sebanyak 22,19%. Rata-rata perhitungan rasio efisien selama tahun 2017-2020 yaitu 89,82%. Dari keempat tahun diatas (2017-2020) Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dinyatakan efisien karena dari perhitungan rasio tersebut kurang dari 100%.

Kinerja pemerintah daerah jika dilihat dari tabel beserta grafik diatas, telah menunjukkan efisien karena Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2017-2020 berhasil menekan realisasi belanja daerah. Meskipun pada tahun 2018-2019 realisasi belanja daerah lebih besar

daripada realisasi pendapatan daerah tetapi di tahun berikutnya pemerintah berhasil menekan realisasi belanja daerah kembali. Agar tetap efisien Pemerintah Kabupaten Lamongan harus menggunakan realisasi belanja daerah tidak lebih besar dari pendapatan daerahnya. Suatu kegiatan operasional dapat dinyatakan efisien jika produk atau hasil kerja tertentu bisa diperoleh dengan menggunakan sumber daya serta biaya yang paling minimum.

3) Rasio Efektifitas

Efektifitas ialah ukuran sukses atau tidaknya suatu entitas dapat mencapai tujuannya. Jika suatu entitas telah sukses memperoleh tujuannya, maka entitas tersebut telah dinyatakan berfungsi secara efektif. Pada penelitian ini, pengukuran rasio efektifitas diukur menggunakan formula berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Output : Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020.

Tabel 4.9
Kriteria Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 100%	Tidak Efektif
= 100%	Efektifitas Berimbang
>100%	Efektif

(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik" 2018)

Tabel 4.10
Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%	Keterangan
2017	2.716.042.671.044,82	2.779.816.159.236,60	97,71%	Tidak Efektif
2018	2.811.062.543.333,02	2.904.634.147.135,00	96,78%	Tidak Efektif
2019	2.864.496.711.416,66	2.997.798.697.186,00	95,55%	Tidak Efektif
2020	2.838.272.211.782,49	2.974.914.693.684,05	95,41%	Tidak Efektif

(Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemkab Lamongan yang telah diolah)

Dari tabel perhitungan rasio efektivitas diatas, selama empat tahun (2017-2020) Pemerintah Kabupaten masih belum dikatakan efektif karena masih kurang dari 100%. Rata-rata rasio efektivitas selama empat tahun (2017-2020) senilai 96,36%. Kinerja pemerintah daerah dapat dinyatakan efektif jika rasio efektivitas lebih dari 100%. Apabila digambarkan dengan grafik, berikut ini merupakan grafik hasil perhitungan rasio efektivitas:

Gambar 4.5
Grafik Rasio Efektivitas



(Sumber: Data Diolah)

Berdasarkan grafik beserta tabel perhitungan diatas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjukkan 97,71%.

Kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,93% menjadi 96,78%. Lalu di tahun 2019 terjadi penurunan lagi sebesar 1,23% sehingga rasio efektivitas menjadi 95,55%. Terakhir di tahun 2020 turun menjadi 95,41% penurunan ditahun tersebut sebesar 0,15%. Rata-rata perhitungan nilai efektif yaitu 96,36%. Sehingga dari tahun 2017-2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan dinilai masih belum efektif.

Pemerintah daerah dapat dinyatakan berhasil apabila bisa merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pada pendapatan yang ditetapkan serta dana yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari target belanja yang diterima. Dari tahun 2017-2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengalami penurunan serta masih kurang dari 100%. Karena kinerja Pemerintah Daerah dapat dikatakan efektif apabila hasil dari rasio efektivitasnya lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Hal tersebut dapat menunjukkan jika Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berhasil menjalankan program kerja dibuktikan dengan realisasi anggaran telah mendekati target anggaran yang sudah ditetapkan. Akan tetapi masih banyak *output* yang masih belum sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas agar dapat memenuhi kriteria efektif, berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik, sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Apabila suatu

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah efektif.

4.3.2. Analisis Hasil Wawancara

1) Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marsiti dan Ibu Tri Handayani, beliau berdua menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah tersebut mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan Daerah, berikut ini penjelasannya:

a) Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintah Daerah memakai pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja lebih bergerak pada penekanan anggaran dari yang berfokus pada pos belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari kegiatan serta program kerja. Peraturan Pemerintah ini memastikan bagaimana proses penyusunan APBD, dimulai dengan pembuatan KUA dan PPAS, lalu dilanjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. Kemudian dari RKA SKPD tersebut digunakan pedoman dalam pembuatan rancangan Perda mengenai APBD serta rancangan Perkada mengenai penjabaran APBD. Dari rancangan Perda serta Perkada yang telah dirancang oleh Kepala Daerah lalu diajukan kepada DPRD agar dibahas

bersama hingga tercapainya kesepakatan. Kemudian rancangan tersebut diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota agar dipertimbangkan. Apabila hasil pertimbangan mengatakan rancangan tersebut telah sesuai bersama dokumen yang mendukung, dapat digunakan pedoman Kepala Daerah agar menetapkan rancangan Perda menjadi Perda mengenai APBD serta rancangan Perkada menjadi Perkada mengenai penjabaran APBD.

b) Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan penatausahaan didalam implementasinya juga penting memperhatikan kinerja yang telah ditentukan dalam APBD. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan fungsi verifikasi dalam SKPD, hingga pengalihan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD bisa sama dengan tujuan awal yakni penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas serta wewenang bendahara sebagai pemegang kas serta juru bayar yang sebagian fungsinya banyak berpindah kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Peraturan Pemerintah ini juga berfokus pada pemisahan tugas. Pemisahan ini dilaksanakan agar tidak adanya kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan menaikkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan harus menaikkan koordinasi antara beberapa pihak pada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

c) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dari hasil wawancara kepada Ibu Tri Handayani dan Ibu Marsiti, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah. Dimana pemerintah telah menyiapkan website resmi BPKAD Kabupaten Lamongan. *Website* tersebut dibuat agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan dengan Realisasi APBD. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika Pemerintah Kabupaten laporan sudah menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan berbentuk laporan keuangan. Berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, paling tidak terdapat tujuh laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berbentuk laporan realisasi kinerja. Dengan laporan ini, rakyat dapat menilai seberapa jauh kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, alat untuk menjaga sinkronisasi mulai proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah menggunakan sistem informasi berbasis digital. Untuk Kabupaten Lamongan sendiri memiliki sistem informasi yang bernama SAKTI atau Aplikasi Keuangan Akuntansi. Di dalam SAKTI sendiri memiliki beberapa fitur yang membantu para ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 214 ayat 1 menyatakan bahwa Pemda perlu menyediakan informasi keuangan daerah serta diumumkan kepada masyarakat.

Menurut pasal 214 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 ayat 3 informasi keuangan daerah digunakan untuk:

- a. Membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan keuangan daerah
- c. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
- d. Membantu kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja keuangan daerah
- e. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional
- f. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat
- g. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

3) Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) telah berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2010. Apabila suatu entitas belum melakukan penerapan PSAP tersebut, entitas pelaporan dapat menerapkannya paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan PSAP tersebut sudah sejak beberapa tahun lalu.

Penyusunan PSAP didasari oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yaitu konsep dasar dalam menyusun serta mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta sebagai pedoman bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pengguna dalam mencari solusi atas suatu masalah, pemeriksa serta yang belum ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang didapatkan dari penerapan SAP Berbasis Akruwal diartikan agar memberi kegunaan lebih baik bagi para pemilik kepentingan, baik para pemeriksa laporan keuangan pemerintah maupun pengguna maupun, dibanding dengan dana yang telah dikeluarkan. Kondisi tersebut sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi yakni dana yang dikeluarkan

sebanding dengan kegunaan yang didapatkan. Selain mengubah basis Standar Akuntansi Pemerintah dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara.

4) *Value for Money*

Dari wawancara dengan Ibu Tri Handayani dan Bapak Dwi H P beliau menyatakan bahwa pengukuran kinerja berdasarkan konsep *Value for Money* penting bagi instansi pemerintah. *Value for Money* memiliki beberapa manfaat seperti yang telah dijelaskan oleh dalam buku Prof. Mardiasmo, 2018 diatas. Disamping itu pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* juga memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui, mengukur serta mengevaluasi kinerja dalam suatu periode tertentu dan meminimalisir pemborosan serta kebocoran dana. Dengan adanya pengukuran ini juga pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Untuk mendapatkan nilai ekonomis dalam konsep *Value for Money* tidak perlu untuk melaksanakan survei harga terlebih dahulu agar mengerti perbandingan harga dikarenakan dari pemerintah sendiri memiliki pedoman harga yang kemudian tinggal memakai anggaran tersebut untuk belanja sesuai harga yang telah ditetapkan. Kemudian dalam pengukuran efektivitas banyak mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran

efektivitas dikarenakan perolehan hasil sering tidak dapat dinyatakan dalam waktu jangka pendek, tetapi jangka panjang setelah selesainya suatu program, sehingga ukuran efektifitas sering diketahui dalam bentuk penjelasan saja. *Value for Money* mengharapkan agar suatu entitas bisa terpenuhi prinsip efisiensi serta efektifitas secara bersamaan. Dengan pengertian lain bahwa *Value for Money* mengharapkan organisasi dapat mendapatkan tujuan yang telah ditentukan dengan biaya serendah-rendahnya.

Konsep *Value for Money* terdiri atas ekonomi, efisiensi, dan efektifitas itu penting untuk diperluas lagi dengan prinsip keadilan (*equity*). Dimana prinsip keadilan tersebut berkaitan dengan prinsip kesetaraan (*equality*). Dengan adanya penambahan konsep *equity* serta *equality* dikarenakan pemerintah jika berfokus pada ekonomi, efisiensi, serta efektifitas saja dimungkinkan dapat mengorbankan pihak tertentu. Jika hanya berfokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektifitas saja bisa menjadikan entitas menghiraukan tanggungjawab sosial. Padahal instansi pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Untuk mempertahankan rasio ekonomis, Pemerintah Daerah harus menggunakan belanja daerah secara maksimal, dikarenakan biaya yang dikeluarkan sebagai belanja daerah masih kurang dari anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat sehingga dirasa belum memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Tetapi harus tetap cermat serta hemat dalam penggunaan belanja daerah agar tidak terjadinya pemborosan. Lalu untuk

mempertahankan rasio efisien Pemerintah Kabupaten Lamongan harus menggunakan realisasi belanja daerah tidak lebih besar dari pendapatan daerahnya. Dari perhitungan *Value for Money* diatas pada rasio efektif, Pemerintah Kabupaten Lamongan masih belum efektif dikarenakan Realisasi pendapatannya lebih kecil dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, realisasi pendapatan harus lebih di tingkatkan lagi agar rasio efektif dapat tercapai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sendiri berasal dari beberapa sektor seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan lain sebagainya. Selain itu pendapatan daerah juga dapat berasal dari pajak serta retribusi daerah. Pada tahun 2020 pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada sektor pariwisata Wisata Bahari Lamongan (WBL) memiliki penurunan karena adanya pembatasan kapasitas pengunjung serta jam operasi dan hal tersebut dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik perlu dilakukan secara terus menerus seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik dengan meningkatkan efektifitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik. Agar *Value*

for Money dapat tercapai maka menggunakan sumber biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.

5) Perbendaharaan

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti bersama narasumber Ibu Marsiti, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan pada pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika dilihat dari jawaban atas pertanyaan penelitian, Ibu Marsiti menjawab sesuai dengan Undang-Undang. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan peraturan yang telah berlaku.

Bendahara pengeluaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mempunyai tugas serta wewenang yaitu:

- a) Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU
- b) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS
- c) Meneliti kelengkapan dokumen
- d) Melakukan pembayaran dari UP, GU, TU yang telah dikelola
- e) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA serta laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

- g) Memungut serta menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian Bendahara Penerimaan serta Bendahara Pengeluaran dilarang untuk:

- a) Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa
- b) Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, serta penjualan jasa, dan
- c) Menyimpan uang di suatu lembaga keuangan ataupun bank atas nama pribadi baik tidak langsung ataupun secara langsung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 18 dan Pasal 20 menyatakan bahwa baik Bendahara Penerimaan ataupun Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan usulan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. Secara administratif Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU/LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Secara fungsional Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab atas pengelolaan uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6) Akuntansi Pemerintahan Daerah

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama narasumber Ibu Tri Handayani, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan dalam akuntansi serta pelaporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika dilihat dari jawaban atas pertanyaan penelitian, Ibu Tri Handayani beliau menjawab beberapa pertanyaan telah sesuai dengan Undang-Undang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam hal Akuntansi Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan berdasar dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah, SAPD, serta Bagan Akun Standar (BAS). Dalam Pasal 188 PP No 12 Tahun 2019 BAS untuk daerah memiliki tujuan yaitu mewujudkan statistik keuangan serta laporan keuangan secara nasional yang terkonsolidasi serta sebanding antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, diantaranya penganggaran, pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan. BAS untuk daerah adalah landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD serta laporan keuangan dengan lengkap.

Dalam Pasal 191 PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

- a. Laporan keuangan Pemerintah Dearah dilaksanakan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan

- b. Laporan keuangan Pemerintah Daerah diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir
- c. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan paling lambat dua bulan setelah mendapatkan laporan keuangan dari Pemerintah Daerah
- d. Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat dua setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 telah berjalan dengan baik. Jika dilihat dari konsep *Value for Money*, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 termasuk dalam kategori ekonomis yaitu memiliki rata-rata senilai 94,35%. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun masih dalam kategori ekonomis yang berarti pemerintah dapat menekan belanja daerah sehingga tidak adanya pemborosan. Untuk rasio efisien, dari keempat tahun 2017-2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan bisa dikatakan efisien dengan rata-rata nilai 89,82% karena dari perhitungan rasio tersebut kurang dari 100%. Meskipun pada tahun 2018-2019 telah menunjukkan hasil lebih dari 100% akan tetapi ditahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berhasil menurunkan realisasi belanja daerah secara signifikan. Kemudian untuk rasio efektif, di tahun 2017-2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan masih dikatakan belum efektif karena rasio efektifitas selama empat tahun sebesar 96,36%. Agar dapat dikatakan efektif Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan realisasi pendapatan daerah secara maksimal.

5.2.Saran

5.2.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bagi pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan bisa melakukan peningkatan efektifitas layanan kepada masyarakat, sehingga dengan *output* yang lebih besar bisa memaksimalkan efektifitasnya. Karena efektifitas dari suatu kegiatan dapat maksimal jika masyarakat merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan. Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Lamongan juga harus tetap memperhatikan penggunaan anggaran dengan baik agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

5.2.2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat daerah diharapkan agar ikut berperan dalam memberi dukungan pada pemerintah daerah agar dapat menyejahterakan daerah yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu, masyarakat juga sebagai pelaku ekonomi, sehingga masyarakat juga harus memiliki kesadaran pajak agar dapat meningkatkan perekonomian daerah.

5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya apabila menggunakan topik yang sama, agar melaksakan pengukuran kinerja keuangan menggunakan pendekatan yang lain atau menambahkan penilaian kinerja yang lain. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih beragam dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS
- BPKAD, K. I. 2018. *Rencana Strategi Perubahan BPKAD 2016-2021*. Lamongan: BPKAD Lamongan.
- BPKAD, K. L. 2022. *Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lamongan* . 2022. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 <<https://bpkad.lamongankab.go.id>>
- Buulolo, E. F. 2020. Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Dengan Pendekatan *Value for Money* Periode 2018. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4*, 579-587.
- Diamastuti, E. 2019. Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 61-74.
- Dukhan, Y. 2022. *Arti Lambang Lamongan yang Wajib Anda Ketahui*. Diakses 11 Januari 2022. <<https://beritalamongan.com>>
- Dwinanda, Y. 2018. Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, Abdul, dan Ilyas Lamuda. 2019. “*Evaluation of Financial Performance Through Approach To Value for Money.*” *Gorontalo Accounting Journal* 2: 31–41.
- Harahap, Heri Faisal. 2020. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah” 4, no. 1: 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Hardani, H. A. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hiktaop, Kristianus. 2020. “Telaah Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money*” 3, no. 1: 22–34.
- Herdiansyah, H. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Prespektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrayani, dan Khairunnisa. 2019. “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode

- 2014-2016).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1: 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>.
- Khalikussabir. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value for Money* (Studi kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *e-jurnal riset manajemen*, 1-22.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almailda
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moh Mahsun, H. A. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nasution, D. A. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan . 2022. *Visi dan Misi kabupaten Lamongan*. Diakses 11 Januari 2022 <<https://lamongankab.go.id>>
- Prawoto, A. (2011). *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Putri & Susliyanti, T. W. 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Pendekatan Value for Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014-2016). *Jurnal Solusi*, 14(1), 85-102. doi:10.51277/keb.v14i1.53
- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba - Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media .
- Reski, Nur Awalia Darmawati, dan Andi K. 2021. Performance Measurement Using Value For Money Concept in Village Government. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 23-29.
- Sakti, R. R. 2021. Measurement Of Financial Performance Using The Concept Of Value For Money In The Government Of Bandung City. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 5, 113-122. doi:10.36555/jasa.v5i1.1470
- Sasmita, D. 2020. Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 9(2), 81-87. doi:10.31000/jmb.v9i2.3256
- Seran, M. S. 2021. Value For Money : Analisis Dampak Pemerintah Desa Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Desa Subun Bestobe. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 140-148.

- Sholihin, D. R. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tama, Annafi Indra. 2017. “Perspektif Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.” *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* 8, no. 2: 221–35. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i2.940>.
- Wulandari, Desti, and Feronika Rosalin. 2017. “Analisis Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dengan Penerapan Value for Money Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang.” *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)* 4, no. 2: 35–60. http://jurnal.muliadarmapratama.ac.id/khusus/03DestiWulandari,FeronikaRosalin_STIEMuliaDarmaPratama.pdf.
- Yulianis, Fitri. 2019. “Analisis Kinerja Keuangan Universitas Muhammadiyah.” *Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295* V, no. 2: 20–33.
- Yusuf, A. M. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A